



Pemerintah
Kabupaten Mamuju



LKjIP TAHUN 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Kabupaten Mamuju



Dr.Hj.SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H.M.Si
Bupati

Yuki Permana, S.T
Wakil Bupati

TA. 2025



(0426) 2324500



www.mamujukab.go.id



Jl. Soekarno Hatta No. 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif dokumen ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi misi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mamuju terwujud atas kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mamuju, Maret 2025


H. SITI SUTINAH SUHARDI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (***Clean and good governance***) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintahan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Mamuju berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan berorientasi kepada hasil (***Result, Oriented Government***) sesuai dengan kewenangan dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat di uji dan dapat diandalkan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 6 (Enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, dengan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja.

1. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 Sasaran dan 4 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 75 % kategori baik dan 25 % kategori Kurang.
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 Indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran sebanyak 4 Indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali dan 2 indikator sasaran atau 50 % kategori Baik .
3. Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja
 - Capaian indikator sasaran sebanyak 5 indikator sasaran atau 83,33% kategori baik Sekali 1 indikator sasaran atau 16,67 % kategori Kurang.
4. Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran sebanyak 2 Indikator sasaran atau 100% kategori baik.

5. Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran sebanyak 2 Indikator sasaran atau 33.33% kategori baik sekali , Capaian indikator sasaran sebanyak 2 indikator sasaran atau 33,33 % kategori Baik serta Capaian indikator sasaran sebanyak 2 indikator sasaran atau 33,34 % kategori Cukup

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik Sekali, 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,98 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata- rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen, dikategorikan Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 bermakna Baik, menurun sebesar 7,65 persen capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR GRAFIK..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Dasar Hukum 1

 C. Gambaran Umum Kondisi Daerah 3

 D. Pertumbuhan Ekonomi 11

 E. Kondisi Pemerintahan 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 23

 A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026..... 23

 1. Visi..... 23

 2. Misi 24

 3. Tujuan dan Sasaran..... 24

 4. Strategi dan Arah Kebijakan 30

 5. Strategi..... 30

 B. Arah Kebijakan Tahunan 36

 C. Indikator Kinerja Utama 38

 D. Perjanjian Kinerja 44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 47

 A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 47

 B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 51

 C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024. 91

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan91

1. Pendapatan Asli Daerah92

2. Pendapatan Transfer97

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah99

BAB IV PENUTUP.....102

A. Kesimpulan dan Saran102

B. Strategi peningkatan kinerja103

LAMPIRAN

- 1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju
- 2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024
- 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 4. LRA Tahun 2024
- 5. Matrix Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026
- 6. SOP Penyusunan LKjIP Kabupaten Mamuju Tahun 2024
- 7. Realisasi Target Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2024
- 8. Penghargaan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024 5

Tabel I.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2021-2024 6

Tabel I.3 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi dan Geofisika Majene, 2024 6

Tabel I.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju (jiwa), 2024..... 8

Tabel I.5 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju,2024.....10

Tabel I.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju,2024.....11

Tabel I.7 Penduduk Berumur 15 Tahun keAtas Menurut Pendidikan TertinggiyangDitamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju,202411

Tabel I.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2021-202412

Tabel I.9 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat (ribu/orang), 2020-202413

Tabel I.10 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-202413

Tabel I.11 Daftar OPD Kabupaten Mamuju tahun 2022.....16

Tabel I.12 Pemerintahan19

Tabel I.13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mamuju Menurut Jabatan, Jensi ASN dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024.....21

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-202625

Tabel II.2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026..... 31

Tabel II.3 Arah Kebijakan Pembangunan 36

Tabel II.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun2021-2026..... 39

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024..... 45

Tabel III.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 48

Tabel III.2 Pencapaian Indikator Sasaran..... 49

Tabel III.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran..... 49

Tabel III.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan 51

Tabel III.5 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik..... 57

Tabel III.6 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 7 (Tujuh) Unsur Pelayanan..... 59

Tabel III.7 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah..... 61

Tabel III.8 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup 63

Tabel III.9 Perbandingan Target dan Capaian IKLH Kabupaten Mamuju tahun 2024 64

Tabel III.10 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya... 72

Tabel III.11 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 80

Tabel III.12 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah..... 81

Tabel III.13 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (persen) ,2021–2024 83

Tabel III.14 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya investasi daerah85

Tabel III.15 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja..... 87

Tabel III.16 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kemandirian desa..... 89

Tabel III.17 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024 .. 92

Tabel III.18 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024..... 92

Tabel III.19 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 93

Tabel III.20 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju 2024..... 94

Tabel III.21 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024..... 96

Tabel III.22 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024..... 97

Tabel III.23 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024..... 99

Tabel III.24 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju 3

Gambar 1. 2 Luas Daerah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan , 2024
..... 4

Gambar 1. 3 Piramida penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2024 9

Gambar 1. 4 Persentase penduduk perkecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024 9

Gambar 3. 1 Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju tahun 2024
..... 65

Gambar 3. 2 Peta Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024 69

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Mamuju, 2022-2024....62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Laporan kinerja Kabupaten Mamuju Tahun 2024 telah tertuang didalam laporan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mamuju. Dengan demikian Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang- undang No 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : DPA / A.1 / 4.01.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2024 tentang Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

C. **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

- 1. **Letak Wilayah Geografis**
Kabupaten Mamuju terletak di sebelah Barat Pulau Sulawesi tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi 10 38’ 110” - 20 54’ 552” Lintang Selatan dan 110 54’ 47” – 130 5’ 35” Bujur Timur dari Jakarta; (00 0’ 0” Jakarta = 1600 48’ 28” Bujur Timur Green Wich).
Secara administrasi, Kabupaten Mamuju berbatasan dengan :
 - ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
 - ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara);
 - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja);
 - ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

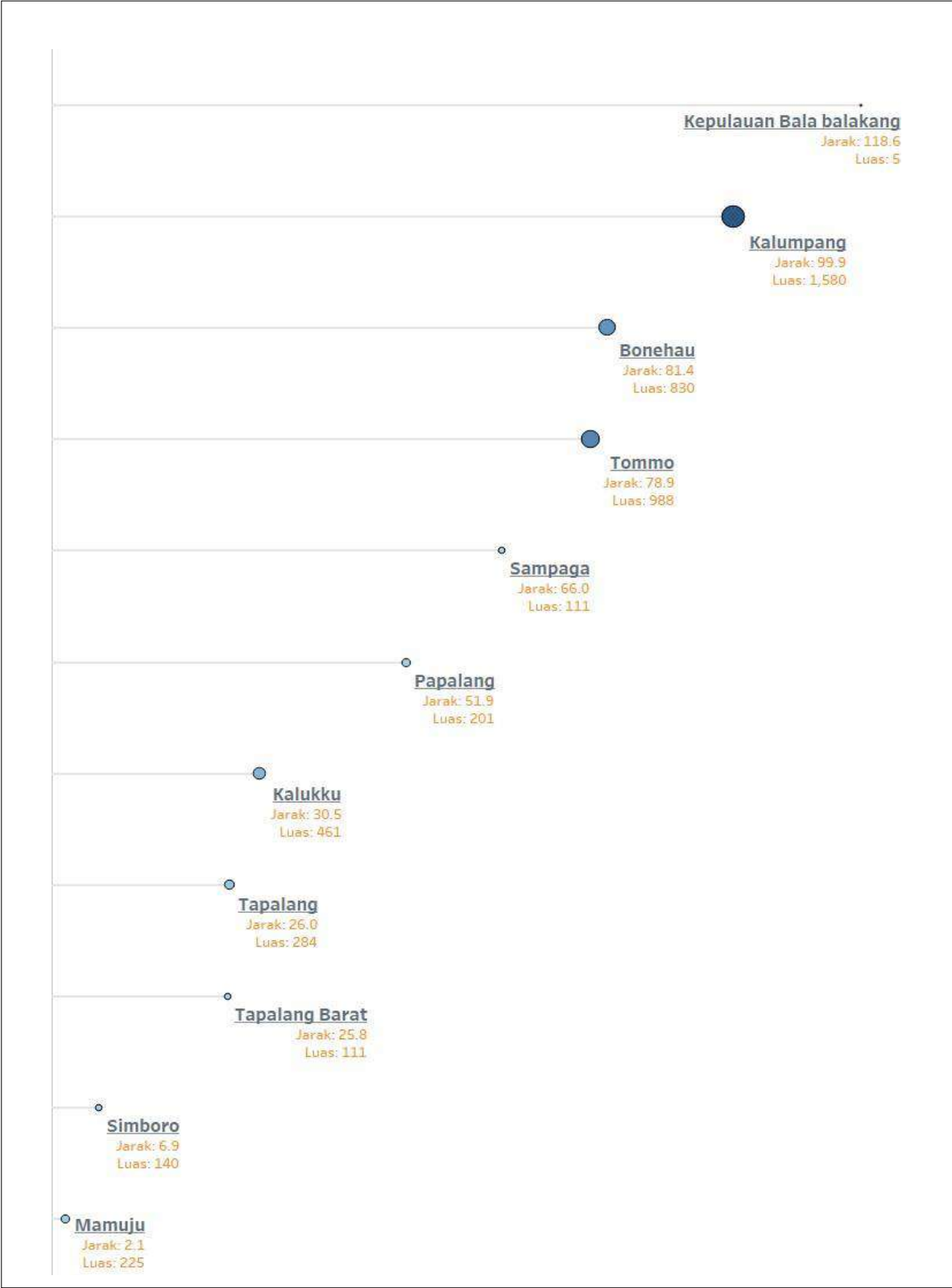
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju



Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah sebesar 4.936,02 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 11 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kalumpang dengan luas 1.5800,07 km² atau

32,01 persen dari luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang dengan luas 5,31 km² atau 0,11 persen. Kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Mamuju adalah Kecamatan Kepulauan Balabalakang yaitu 188,62 km.

Gambar 1.2
Luas Daerah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan , 2024



Sumber Data : Mamuju Dalam Angka, 2025

Tabel I.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024

| Kecamatan <i>District</i> | IbukotaKecamatan <i>CapitalofDistrict</i> | Luas <i>TotalArea</i> (km ² /sq.km) |
|------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| Tapalang | Galung | 284,42 |
| TapalangBarat | Dungkait | 110,84 |
| Mamuju | Binanga | 224,90 |
| Simboro | Rangas | 140,11 |
| KepulauanBalabalakang | PulauSalissingan | 5,31 |
| Kalukku | Kalukku | 460,65 |
| Papalang | Topore | 200,69 |
| Sampaga | Bunde | 110,96 |
| Tommo | Campaloga | 987,90 |
| Kalumpang | Kalumpang | 1.580,07 |
| Bonehau | Bonehau | 830,17 |
| KabupatenMamuju | Karema | 4.936,02 |

| Kecamatan <i>District</i> | PersentaseterhadapLuasKabupaten/ Kota <i>Percentagetoregency/ Municipal Area</i> | JumlahPulau <i>NumberofIslands</i> |
|------------------------------|--|---------------------------------------|
| (1) | (4) | (5) |
| Tapalang | 5,76 | 1 |
| TapalangBarat | 2,25 | 1 |
| Mamuju | 4,56 | 2 |
| Simboro | 2,84 | 1 |
| KepulauanBalabalakang | 0,11 | 14 |
| Kalukku | 9,33 | 1 |
| Papalang | 4,07 | 1 |
| Sampaga | 2,25 | 1 |
| Tommo | 20,01 | 1 |
| Kalumpang | 32,01 | 1 |
| Bonehau | 16,82 | 1 |
| KabupatenMamuju | 100,00 | 16 |

Sumber Data Mamuju Dalam Angka ,2025

Tabel I.2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2021-2024

| Kecamatan District | 2021 ² | 2022 ³ | 2023 ⁴ | 2024 ⁵ | 2024 ⁶ |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Tapalang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TapalangBarat | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mamuju | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Simboro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| KepulauanBalaBalakang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kalukku | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Papalang | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sampaga | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tommo | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kalumpang | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bonehau | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| KabupatenMamuju | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

2. Iklim

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim. Oleh karena itu, curah hujan beragam menurut bulan. Selama 2024 dari pantauan yang tercatat, hanya tersedia data 7 bulan pemantaun, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 530,20 mm.

Tabel I.3
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi
dan Geofisika Majene, 2024

| Bulan Month | Suhu/Temperature(°C) | | | Kelembaban/Humidity(%) | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | Minimum | Rata-rata Average | Maksimum Maximum | Minimum | Rata-rata Average | Maksimum Maximum |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Januari/January | ... | ... | ... | 64,00 | ... | 100 |
| Februari/February | ... | ... | ... | 69,00 | ... | 100 |
| Maret/March | ... | 27,08 | ... | 73,00 | 91,91 | 100 |
| April/April | ... | 27,74 | ... | 71,00 | 90,67 | 100 |
| Mei/May | ... | 27,77 | ... | 77,00 | 93,62 | 100 |
| Juni/June | ... | 27,01 | ... | 68,00 | 93,16 | 100 |
| Juli/July | ... | 26,41 | ... | 78,00 | 93,50 | 100 |
| Agustus/August | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| September/September | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Oktober/October | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| November/November | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Desember/December | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Lanjutan Tabel 1.3

| Bulan Month | Kecepatan Angin (knot) Wind Velocity (knot) | | | Tekanan Udara / Atmospheric Pressure (mbar) | | |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| | Minimum | Rata-rata Average | Maksimum Maximum | Minimum | Rata-rata Average | Maksimum Maximum |
| (1) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Januari / January | - | 2,26 | 5,10 | 1.007,10 | 1.010,74 | 1.015,20 |
| Februari / February | - | 2,18 | 4,60 | 1.007,60 | 1.011,63 | 1.015,40 |
| Maret / March | - | 2,10 | 5,70 | 1.005,40 | 1.009,65 | 1.013,60 |
| April / April | - | 2,11 | 6,20 | 1.004,60 | 1.008,00 | 1.012,20 |
| Mei / May | - | 1,93 | 6,20 | 1.003,90 | 1.007,96 | 1.011,50 |
| Juni / June | - | 1,79 | 5,10 | 1.006,30 | 1.009,35 | 1.012,90 |
| Juli / July | - | 1,97 | 3,60 | 1.005,70 | 1.008,96 | 1.013,80 |
| Agustus / August | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| September / September | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Oktober / October | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| November / November | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Desember / December | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



| Bulan Month | Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) Number of Precipitation (mm/year) | Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day) | Penyinaran Matahari (jam) Duration of Sunshine (hour) |
|-----------------------|---|---|---|
| (1) | (14) | (15) | (16) |
| Januari / January | 411,10 | 22 | 4,4 |
| Februari / February | 275,00 | 12 | 6,6 |
| Maret / March | 502,20 | 20 | 4,9 |
| April / April | 216,40 | 20 | 6,9 |
| Mei / May | 570,10 | 21 | 5,3 |
| Juni / June | 279,50 | 20 | 4,7 |
| Juli / July | 76,50 | 7 | 4,8 |
| Agustus / August | ... | ... | ... |
| September / September | ... | ... | ... |
| Oktober / October | ... | ... | ... |
| November / November | ... | ... | ... |
| Desember / December | ... | ... | ... |

Sumber Data : Mamuju Dalam Angka, 2025

3. Kependudukan

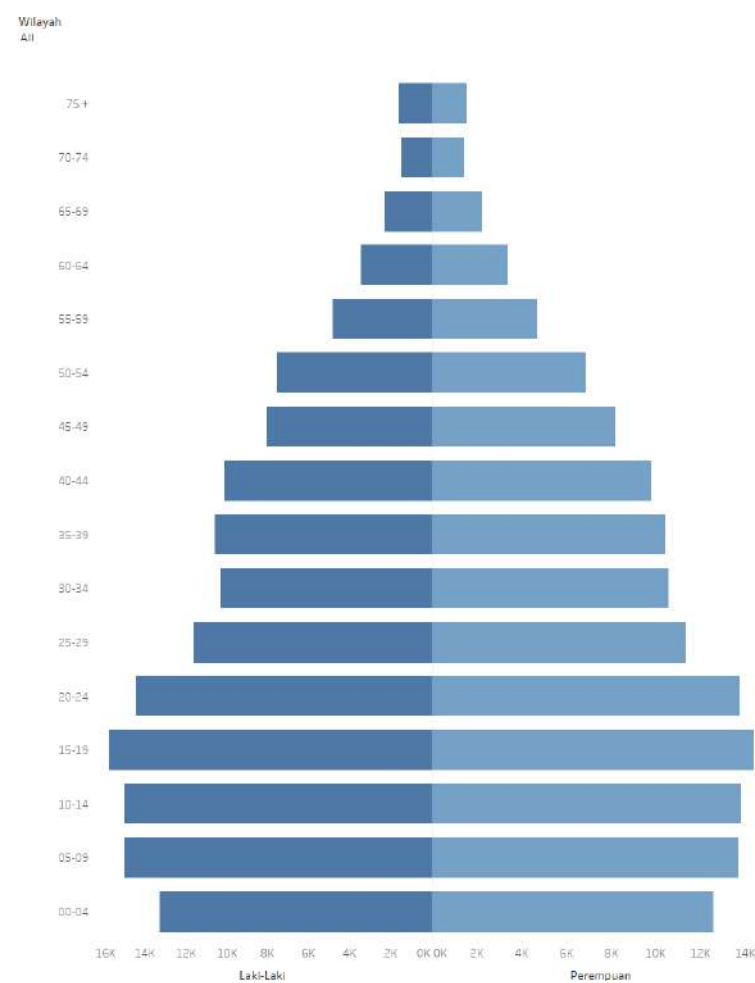
Data penduduk tahun 2024 yang disajikan pada bab ini sebelumnya adalah hasil proyeksi data Sensus Penduduk 2020. Kini, data yang digunakan bersumber dari catatan administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju tahun 2024 tercatat sebanyak 288.382 jiwa dengan rasio jenis kelamin 105. Rasio tersebut menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Mamuju lebih banyak dibandingkan perempuan.

Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju mencapai 58,42 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kepulauan Balabalakang, dengan 2.282,96 jiwa per km².

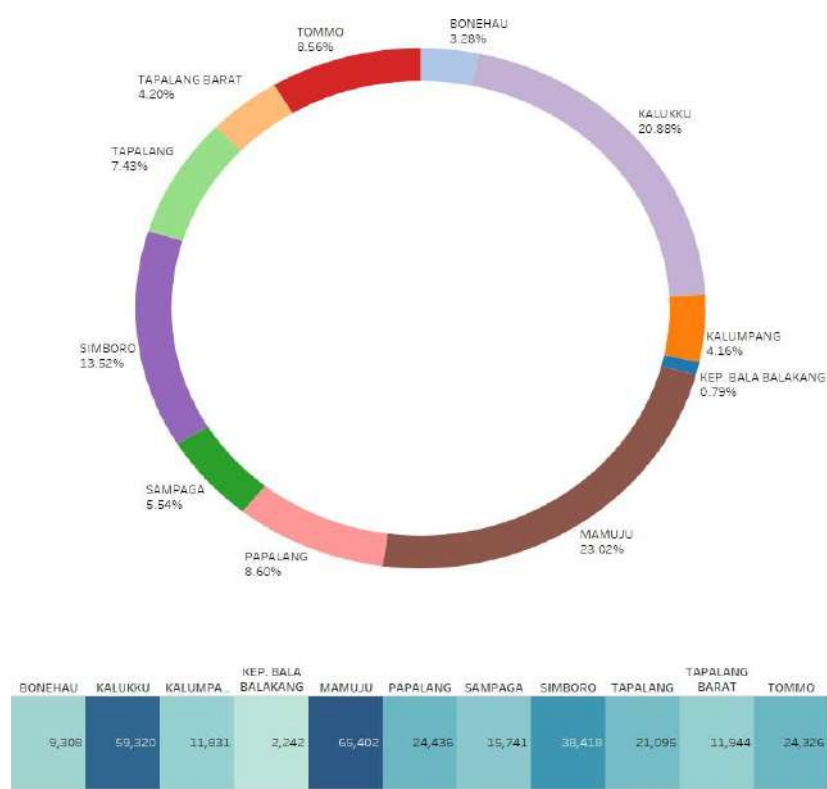
Tabel I.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Mamuju (jiwa), 2024

| KelompokUmur AgeGroups | JenisKelamin/Sex | | Jumlah Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Laki-Laki Male | Perempuan Female | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0-4 | 13,2 | 12,4 | 25,5 |
| 5-9 | 15,2 | 14,0 | 29,2 |
| 10-14 | 14,9 | 13,9 | 28,8 |
| 15-19 | 15,5 | 13,9 | 29,4 |
| 20-24 | 14,9 | 14,0 | 28,9 |
| 25-29 | 12,0 | 11,6 | 23,6 |
| 30-34 | 10,5 | 10,6 | 21,1 |
| 35-39 | 10,6 | 10,4 | 21,0 |
| 40-44 | 10,2 | 10,0 | 20,2 |
| 45-49 | 8,5 | 8,4 | 16,9 |
| 50-54 | 7,5 | 7,0 | 14,5 |
| 55-59 | 5,3 | 5,1 | 10,4 |
| 60-64 | 3,7 | 3,6 | 7,3 |
| 65-69 | 2,5 | 2,4 | 4,9 |
| 70-74 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| 75+ | 1,7 | 1,7 | 3,4 |
| KabupatenMamuju | 147,8 | 140,6 | 288,4 |

Gambar 1.3
Piramida penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2024



Gambar 1.4
Persentase penduduk perkecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024



Tabel I.5
 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024

| Kecamatan District | JumlahPenduduk (jiwa) Population(people) | LajuPertumbuhanPendudukper Tahun2023-2024(%) AnnualPopulationGrowthRate 2023-2024(%) |
|-----------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Tapalang | 32.675 | 0,19 |
| TapalangBarat | 10.460 | 0,3 |
| Mamuju | 29.281 | 0,29 |
| Simboro | 5.728 | 0,43 |
| KepulauanBalaBalakang | 12.127 | 0,17 |
| Kalukku | 7.835 | 0,07 |
| Papalang | 11.780 | 0,08 |
| Sampaga | 19.356 | 0,75 |
| Tommo | 5.862 | 0,27 |
| Kalumpang | 4.443 | 0,14 |
| Bonehau | 1.080 | 0,52 |
| KabupatenMamuju | 288.382 | 0,29 |

Sumber Data Mamuju Dalam Angka ,2025

4. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal bagi pembangunan suatu bangsa. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2024 terdapat 213.059 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju. Bagian yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Mamuju tahun 2024 sebesar 75,48 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,77 persen. Jumlah angkatan kerja yang bekerja sekitar 156.375 orang.

Tabel I.6
 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama
 Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju,2024

| KegiatanUtama MainActivity | JenisKelamin/Sex | | |
|---|-------------------|---------------------|--|
| | Laki-Laki Male | Perempuan Female | Laki-Laki+ Perempuan Male+Female |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I.Angkatankerja/Economicallyactive | 96.343 | 64.484 | 160.827 |
| 1.Bekerja/Working | 94.703 | 61.672 | 156.375 |
| 2.Pengangguranterbuka/Unemployment | 1.640 | 2.812 | 4.452 |
| II.Bukanangkatankerja/Noteconomicallyactive | 12.580 | 39.652 | 52.232 |
| Jumlah/Total | 108.923 | 104.136 | 213.059 |

Tabel I.7
 Penduduk Berumur 15 Tahun keAtas Menurut Pendidikan Tertinggiyang
 Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di
 Kabupaten Mamuju,2024

| Pendidikan Tertinggiyang Ditamatkan ¹ Educ ational Attainment ¹ | AngkatanKerja/EconomicallyActive | | | PersentaseBekerja terhadapAngkatan Kerja Percentageof Workingto Economically Active |
|---|----------------------------------|--|--|---|
| | Bekerja Working | Pengangguran ² Unemployment ² | Jumlah AngkatanKerja Totalof Economically Active | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0 | 67.805 | 1.565 | 69.370 | 0,98 |
| 1 | 22.183 | 380 | 22.563 | 0,98 |
| 2 | 40.951 | 2.356 | 43.307 | 0,95 |
| 3 | 25.436 | 151 | 25.587 | 0,99 |
| Jumlah/Total | 156.375 | 4.452 | 160.827 | 0,97 |

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Sulawesi Barat mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024, dengan beberapa tahun mengalami kontraksi dan beberapa tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif. Meskipun demikian,

secara keseluruhan, terdapat tren positif dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang cenderung meningkat selama periode tersebut. Pasangkayu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup variatif, termasuk tahun dengan pertumbuhan negatif yang signifikan pada tahun 2020, namun menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun 2024.

Dilihat dari data jumlah penduduk miskin, Kabupaten Mamuju masih cukup rendah dibandingkan kabupaten lain. Jumlah penduduk miskin kabupaten mamuju pada 2023 diperkirakan sebanyak 22,64 ribu atau tidak sampai setengah dari yang tertinggi di polewali mandar yang mencapai 70,42 ribu orang. Capaian kualitas hidup tercermin melalui IPM. Tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Mamuju sebesar 71,86. Nilai IPM Kabupaten Mamuju berada di posisi kedua dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.

Tabel I. 8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2021-2024

| Kabupaten/Kota Regency/Municipality | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|--|------|-------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Majene | 2,13 | 2,38 | 5,29 | 5,30 |
| PolewaliMandar | 1,87 | 3,58 | 4,56 | 5,94 |
| Mamasa | 2,00 | 1,79 | 3,36 | 3,26 |
| Mamuju | 2,35 | 3,28 | 4,47 | 6,47 |
| Pasangkayu | 3,78 | -0,02 | 6,78 | 0,68 |
| MamujuTengah | 3,26 | 2,34 | 2,77 | 2,98 |
| SulawesiBarat | 2,57 | 2,26 | 5,23 | 4,76 |

Sumber Data : Mamuju Dalam Angka Tahun 2025

Tabel I.9
Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat
(ribu/orang), 2020-2024

| Kabupaten/Kota Regency/Municipality | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Majene | 24,12 | 25,01 | 26,62 | 25,80 | 24,41 |
| PolewaliMandar | 68,18 | 69,32 | 72,87 | 71,92 | 70,42 |
| Mamasa | 21,86 | 22,29 | 23,70 | 23,58 | 23,61 |
| Mamuju | 20,65 | 22,30 | 23,26 | 23,50 | 22,64 |
| Pasangkayu | 7,95 | 8,53 | 9,30 | 8,94 | 9,95 |
| MamujuTengah | 9,25 | 9,74 | 9,98 | 10,39 | 11,16 |
| SulawesiBarat | 152,01 | 157,19 | 165,72 | 164,14 | 162,19 |

Tabel I.10
Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2024

| Kabupaten/Kota Regency/Municipality | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|--|------|-------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Majene | 2,13 | 2,38 | 5,29 | 5,30 |
| PolewaliMandar | 1,87 | 3,58 | 4,56 | 5,94 |
| Mamasa | 2,00 | 1,79 | 3,36 | 3,26 |
| Mamuju | 2,35 | 3,28 | 4,47 | 6,47 |
| Pasangkayu | 3,78 | -0,02 | 6,78 | 0,68 |
| MamujuTengah | 3,26 | 2,34 | 2,77 | 2,98 |
| SulawesiBarat | 2,57 | 2,26 | 5,23 | 4,76 |

Sumber Data : Mamuju Dalam Angka Tahun 2025

E. Kondisi Pemerintahan

Pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari Bupati, Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Hidup dan Kebersihan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kantor Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Perdagangan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Kecamatan; dan Kelurahan.

Struktur organisasi Kabupaten Mamuju mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju . Adapun Organisasi Perangkat Daerah Terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah;
5. Badan Daerah; dan
6. Kecamatan.

Dengan uraian OPD berdasarkan Tipe sebagai berikut

1. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Perangkat Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) asisten.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Perangkat Daerah

Tipe B. terdiri atas 3 (tiga) bagian. Dan 3 (tiga) subbagian.

3. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
4. Dinas Daerah terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
 - f. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B;
 - g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan Dinas Tipe B;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
 - o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe B;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Non Tipe;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B;
 - s. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 - u. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan merupakan Dinas Tipe B;
 - v. Dinas Perkebunan merupakan Dinas Tipe B;
 - w. Dinas Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
5. Badan Daerah terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi merupakan Badan Daerah Tipe A;

- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A;
 - c. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe B;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Daerah TipeB;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Daerah Tipe A;
6. Kecamatan terdiri atas :
- a. Kecamatan Tapalang Barat merupakan kecamatan Tipe A;
 - b. Kecamatan Mamuju merupakan kecamatan Tipe A;
 - c. Kecamatan Simboro merupakan kecamatan Tipe A;
 - d. Kecamatan Tapalang merupakan kecamatanTipe A;
 - e. Kecamatan Kepulauan Balabalakang merupakan kecamatan Tipe A;
 - f. Kecamatan Kalukku merupakan kecamatanTipe A;
 - g. Kecamatan Papalang merupakan kecamatanTipe A;
 - h. Kecamatan Sampaga merupakan kecamatanTipe A;
 - i. Kecamatan Tommo merupakan kecamatan Tipe A;
 - j. Kecamatan Kalumpang merupakan kecamatanTipe A;
 - k. Kecamatan Bonehau merupakan kecamatanTipe A.

Tabel I.11
Daftar OPD Kabupaten Mamuju tahun 2024

| No | Organisasi Perangkat Daerah |
|----|---|
| 1 | Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| 4 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 5 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 6 | Dinas Sosial |
| 7 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 9 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | |
|----|---|
| 11 | Dinas Perkebunan |
| 12 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 13 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan |
| 14 | Dinas Perhubungan |
| 15 | Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) |
| 18 | Dinas Perdagangan |
| 19 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 21 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 22 | Dinas Kesehatan |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 24 | Inspektorat |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) |
| 26 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) |
| 27 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) |
| 29 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) |
| 31 | Sekretariat DPRD |
| 32 | Sekretariat Daerah |
| 33 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) |
| 34 | Bagian Tata Pemerintahan |
| 35 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |

| | |
|----|---|
| 36 | Bagian Hukum |
| 37 | Bagian Kerja Sama |
| 38 | Bagian Perekonomian |
| 39 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 40 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 41 | Bagian Sumber Daya Alam |
| 42 | Bagian Umum |
| 43 | Bagian Organisasi |
| 44 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 45 | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 46 | Kecamatan Mamuju |
| 47 | Kecamatan Simboro |
| 48 | Kecamatan Tapalang |
| 49 | Kecamatan Tapalang Barat |
| 50 | Kecamatan Kalukku |
| 51 | Kecamatan Kalukku |
| 52 | Kecamatan Sampaga |
| 53 | Kecamatan Tommo |
| 54 | Kecamatan Bonehau |
| 55 | Kecamatan Kalumpang |
| 56 | Kecamatan Bala-Balakang |

Aparat sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkup pemerintah daerah kabupaten mamuju sebanyak 5.369 orang yang terdiri dari 4.028 orang pegawai negeri sipil dan 1.341 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja.

Jika dilihat dari komposisi menurut jenis kelamin, terdapat sekitar 38,2 persen ASN adalah laki-laki dan 61,8 persen perempuan. Proporsi ASN

menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut 0,09 persen berpendidikan SD, 0,17 persen berpendidikan SLTP/Sederajat, 13,28 persen berpendidikan SMA/ Sederajat, 9,29 persen berpendidikan Diploma I-III, 77,17 persen berpendidikan sarjana ke atas. Komposisi ini dinamis namun ada kecenderungan kualifikasinya makin tinggi.

Dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah menangani beberapa Urusan Pemerintahan berdasarkan Tugas dan fungsi OPD tersebut, adapun Urusan - urusan yang dilaksanakan dipaparkan dalam table sebagai berikut :

Tabel I.12
Pemerintahan

| URUSAN | KETERANGAN |
|---|--|
| URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN |
| | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | DINAS SOSIAL |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| | |
|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | DINAS PERDAGANGAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH |
| FUNGSI SEKRETARIAT DPRD | SEKRETARIAT DPRD |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| FUNGSI PERENCANAAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| FUNGSI KEUANGAN | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| FUNGSI KEPEGAWAIAN | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | |
| INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT DAERAH |
| UNSUR KEWILAYAHAN | |
| KECAMATAN | SEMUA KECAMATAN |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

Tabel I.13

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mamuju Menurut Jabatan, Jensi ASN dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024

| Jabatan Occupation | Pegawai Negeri Sipil Civil Servant | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| | Laki-laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives | 27 | 6 | 33 |
| Administrator/ Administrator | 116 | 55 | 171 |
| Pengawas/ Supervisor | 133 | 101 | 234 |
| Eselon V/ 5 th Echelon | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher | 535 | 852 | 1.387 |
| Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field | 107 | 540 | 647 |
| Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field | 246 | 240 | 486 |
| Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana General Functional Position | 565 | 505 | 1.070 |
| Jumlah/Total | 1.729 | 2.299 | 4.028 |

| Jabatan Occupation | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Government Contractual Employee | | |
|--|---|---------------------|-----------------|
| | Laki-laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total |
| (1) | (5) | (6) | (7) |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives | 0 | 0 | 0 |
| Administrator/ Administrator | 0 | 0 | 0 |
| Pengawas/ Supervisor | 0 | 0 | 0 |
| Eselon V/5 th Echelon | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher | 279 | 842 | 1.121 |
| Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field | 43 | 177 | 220 |
| Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field | 0 | 0 | 0 |
| Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah/Total | 322 | 1.019 | 1.341 |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada tahun 2024, komposisi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Mamuju berjumlah 30 orang, terdiri dari 28 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Proporsi anggota DPRD menurut parpol terbanyak adalah Partai Demokrat dengan 9 orang, 1 di antaranya perempuan. Disusul Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) masing-masing dengan 4 wakil.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju (orang), 2024

| Partai Politik Political Parties | Laki-laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Partai Demokrat | 8 | 1 | 9 |
| Partai Golongan Karya (Partai Golkar) | 2 | - | 2 |
| Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) | 3 | - | 3 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 1 | 2 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 4 | - | 4 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2 | - | 2 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | - | 1 |
| Partai Bulan Bintang (PBB) | 1 | - | 1 |
| Partai Nasional Demokrat (NasDem) | 4 | - | 4 |
| Partai keadilan Sejahtera (PKS) | 2 | - | 2 |
| Kabupaten Mamuju | 28 | 2 | 30 |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2025 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka Panjang Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri pada tahun 2025.

Tantangan tahapan priode ini sangat berat untuk memenuhi target RPJPD 2025 setelah Kabupaten Mamuju terdampak covid 19 dan gempa bumi yang melumpuhkan hampir semua sendi kehidupan. Sangat diperlukan Visi yang kuat, kreatifitas dan inovasi yang tinggi agar harapan untuk mencapai Mamuju yang maju dan Mandiri dapat dicapai. Kenyataan tersebut menjadi latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan focus dan perhatian pada peletakan Kembali sendi-sendi pembangunan yang berorientasi pada hasil (*out come*) dengan memanfaatkan semua kekuatan berupa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, peluang letak geografi dan demografi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut Tema Visi “Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri” dapat di rumuskan bahwa Mamuju Maju dan Mandiri menjadi arah pembangunan Kabupaten Mamuju dalam lima tahun ke depan dengan Visi :

MAMUJU KEREN
(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif,
Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021- 2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Visi Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

| No | Misi RPJMD | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Indikator Tujuan/ Sasaran | | Satuan | Kondisi Awal 2020/2021 | Target Kinerja | | | | |
|----|---|--|--|------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih | | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | C | CC | B | B | BB | A |
| | | Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan | Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan | a. | Indeks Pengelolaan keuangan Daerah | Peringkat | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK |
| | | | | b. | Nilai LPPD | Skor | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| | | | | c. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan | Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | | 1 | Indeks Pembangunan Infrastruktur | Persen | N/A | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| | | | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah | a. | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Persen | N/A | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| | | | Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | b. | Indeks kualitas lingkungan hidup | Persen | 77,14 | 77,41 | 77,68 | 77,95 | 78,22 | 78,49 |
| | | | | c. | Indeks Resiko Bencana | Predikat | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Sedang | Sedang |
| 3 | Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Persen | 68,15% | 68,35% | 68,50% | 68,70% | 68,85% | 69,05% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Kesehatan dan Sosial. | | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | a. | Indeks Pendidikan | Skala | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,50 | 0,55 |
| | | | | b. | Indeks Kesehatan | Skala | 0,508 | 0,522 | 0,556 | 0,578 | 0,612 | 0,632 |
| | | | | c. | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli) | Ribu Rupiah / Orang/ Tahun | 9.500 | 12.000 | 24.000 | 32.500 | 44.000 | 52.000 |
| | | | | d. | Indeks Pemberdayaan Gender | Persen | 58,96 | 59,12 | 59,58 | 59,87 | 60,12 | 60,55 |
| | | | | e. | Indeks Kesejahteraan Sosial | Persen | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 4 | Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal | Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara | | 1 | Indeks ketentraman dan ketertiban | Persen | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----|----------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | a. | Indeks Kriminilitas | Persen | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal | Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi | | 1 | Indeks Gini | Persen | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,19 |
| | | | Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah | a. | Pertumbuhan ekonomi | Persen | -2,08 | 5.0-5.5% | 5.5-5.6% | 5.6-5.7% | 5.7-5.8% | 5.8-6.0% |
| | | | Meningkatnya investasi daerah | b. | Pertumbuhan Investasi | Persen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Mengentaskan Kemiskinan | | 2 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 7,4 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 |

| No | Misi RPJMD | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Indikator Tujuan/Sasaran | | Satuan | Kondisi Awal 2020/2021 | Target Kinerja | | | | |
|----|------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | a. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 2,89 | 2,75 | 2,49 | 2,27 | 2,05 | 2,00 |
| | | | Meningkatnya kemandirian desa | b. | Indeks Desa Membangun | Skala | 0,611 (Berkembang) | 0,624 (Berkembang) | 0,645 (Berkembang) | 0,687 (Berkembang) | 0,700 (Berkembang) | 0,707 (Maju) |

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

| No | Misi RPJMD | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Strategi RPJMD |
|----|--|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih | Meningkatnya kinerja Keuangan dan Pengawasan | Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai |
| | | | | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi melalui perbaikan proses dan pelayanan perijinan dengan menerapkan system aplikasi berbasis online |
| | | | | Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuat kapabilitas APIP |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Peningkatan implementasi single data dan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi melalui Kartu Mamuju Keren |
| 2 | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang berkelanjutan | Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah | Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaan pemerintahan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik |
| | | | | Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru |
| | | | | Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan |
| | | | | Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, sanitasi dan air bersih serta pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | Memperhatika n Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | | Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan |
| | | | | Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang |
| | | | Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan |
| | | | | Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tutupan lahan dan udara |
| | | | | Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah |
| | | | | Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana |
| 3 | Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. | Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui: pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan; b. peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah; c. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah; d. peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan e. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang SD dan SMP melalui Gerakan Kembali Bersekolah |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat</p> <p>Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana</p> <p>Adanya Regulasi atau kebijakan terkait permasalahan ketimpangan gender</p> <p>Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga.</p> <p>Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.</p> <p>Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.</p> <p>Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak</p> <p>Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|--------------|--|
| 4. | Mewujudkan daerah | Meningkatkan kedisiplinan, | Meningkatnya | Peningkatan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan untukmengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat. |
|----|-------------------|----------------------------|--------------|--|

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | yang beradab dengan mengedapkan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal. | ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara | ketentraman dan ketertiban umum | Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS. |
| 5 | Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal | Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi | Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah | <p>Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian</p> <p>Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner</p> <p>Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan penyediaan sarana produksi perikanan</p> <p>Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.</p> <p>Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah</p> <p>Memfokuskan penyelesaian administrasi persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mamuju</p> <p>Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru</p> <p>Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan</p> |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | pembangunan museum. |
| | | | Meningkatnya investasi daerah | Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi |
| | | Pengentasan Kemiskinan | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) |
| | | | | Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja |
| | | | Meningkatnya kemandirian desa | Meningkatkan kemandirian melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa |

B. Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Tabel II.3
Arah Kebijakan Pembangunan

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| KEREN I Penguatan birokrasi penopang utama pemulihan ekonomi | KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan | KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan | KEREN IV Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan | Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju |

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2024 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1) Arah Kebijakan Transisi Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: “Memantapkan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Mamuju yang berketahanan Sosial”

Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

- a. Penurunan Kemiskinan
- b. Daya saing ekonomi lokal
- c. Penurunan ketimpangan wilayah

2) Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: “KEREN I : Penguatan birokrasi penopang utama pemulihan ekonomi”

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Implementasi single data didukung teknologi informasi terintegrasi
- b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi
- d. Peningkatan PAD dengan membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
- e. Peningkatan kapasitas SDM UMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
- f. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata.

3) Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: “KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Peningkatan produktivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi berbasis potensi daerah
- b. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
- c. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
- d. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)

4) Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: “KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan”

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
- b. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
- c. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
- d. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

5) Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: “KEREN IV Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- b. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- c. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dan pengurangan kemiskinan.

6) Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: “Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju”.

Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

- a. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjagakondusifitas wilayah.
- b. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumber daya local.
- c. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing danberkarakter
- d. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif,bersih dan akuntabel)
- e. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

C. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Mamuju dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :

Tabel II. 4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun2021-2026

| No | Indikator Kinerja Daerah | Formulasi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020/2021 | Target Kinerja | | | | | Target Akhir RPJMD |
|----|---|--|-------------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ | % | 68,15 | 68,35 | 68,50 | 68,70 | 68,85 | 69,05 | 69,05 |
| 2. | Indeks Pendidikan | $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ | Skala | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| 3. | Indeks Kesehatan | $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ | Skala | 0,508 | 0,522 | 0,556 | 0,578 | 0,612 | 0,632 | 0,632 |
| 4. | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli) | $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ | Ribu Rupiah/Orang/Tahun | 9.500 | 12.000 | 24.000 | 32.500 | 44.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5. | Indeks Pemberdayaan Gender | $IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$ | % | 58,96 | 59,12 | 59,58 | 59,87 | 60,12 | 60,55 | 60,55 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|
| 6 | Indeks Kesejahteraan Sosial | 40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30% Persentase PSKS yang aktif | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| | Indeks Pembangunan Infrastruktur | [40%{50% (50% kualitas sarpras jalan& jembatan + 50% kualitas PJU) } + {40 % (50% kualitas saluran pengairan + 50%drainase kondisi baik)} + (10 % Pemenuhan bangunansesuai standar)] + [20%{50% pengurangansampah + 50 % pengangkutan sampah }]+30%Level of Service + [10% ({50% kampungtangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi} +{30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+30% edukasi | % | N/A | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | proteksi kebakaran+40 % response time })/2] | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Survey kepuasan layanan infrastruktur : 1. Ketersediaan Fisik(<i>availability</i>) 2. Kualitas Fisik (<i>quality</i>) 3. Kesesuaian (<i>Appropriateness</i>) 4. Efektifitas Pemanfaatan (<i>Utility</i>) 5. Penyerapan Tenaga Kerja (<i>Job Creation</i>) 6. Kontribusi padaPerekonomian | % | N/A | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 30%IKU + 30% IKA + 40% ITV | % | N/A | 80 | 80 | 80 | 80,5 | 80,6 | 80,6 |
| | Indeks Resiko Bencana | $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ | Predik at | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedan g | Sedan g | Sedan g | Seda ng |
| | Indeks Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah kasus tertangani tahun n-1 dibagi jumlah kasus tahun ndikali 100 | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Indeks Kriminilitas | $I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$ | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indeks Gini | $GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} (F_{Ci-1} + Y_{Ci})$ | % | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | $R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1) / PDBt-1 \times 100\%$ | % | -2,08 | 5.0-5.5% | 5.5-5.6% | 5.6-5.7% | 5.7-5.8% | 5.8-6.0% | 5.8-6.0% |
| | Pertumbuhan Investasi | $CAGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\left(\frac{1}{\# \text{ of years}} \right)} - 1$ | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Persentase Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100 | % | 7,4 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | $TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$ | % | 2,89 | 2,75 | 2,49 | 2,27 | 2,05 | 2,00 | 2,00 |
| | Indeks Desa Memban gun | $IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$ | Skala | 0,683 | 0,690 | 0,695 | 0,698 | 0,700 | 0,707 | 0,707 |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Skor hasil evaluasi mandiri reformasi birokrasi | Predik at | C | CC | B | B | BB | A | A |
| | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran + pengalokasian anggaran belanja dalam APBD + | Predik at | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Transparansi pengelolaan keuangan + Penyerapan anggaran + Kondisi keuangan daerah + Opini BPK | | | | | | | | |
| | Nilai LPPD | Hasil Penilaian LPPD | Skor | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | Skor | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

1) Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan Perjanjian kinerja, terbagi atas tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diantaranya meliputi :

- a) Intensifikasi pencegahan korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya meliputi:

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah (mandat);
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

| SASARAN 1 Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan | | |
|--|-----------|-------------------|
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | B |
| Indeks Pengelolaan keuangan Daerah | Peringkat | Baik |
| Nilai LPPD | Skor | Sangat Tinggi |
| SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor | 90 |
| SASARAN 3 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Indeks Pembangunan Infrastruktur | Persen | 70 |
| Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Persen | 70 |
| SASARAN 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 80 |
| Indeks Resiko Bencana | Predikat | Sedang |
| SASARAN 5 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Indeks Pembangunan Manusia | Persen | 68,70 |
| Indeks Pendidikan | Skala | 0,42 |
| Indeks Kesehatan | Skala | 0,578 |

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) | Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun | 32.500 |
| Indeks Pemberdayaan Gender | Persen | 59,87 |
| Indeks Kesejahteraan Sosial | Persen | 65 |
| SASARAN 6 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Indeks ketentraman dan ketertiban | Persen | 100 |
| Indeks Kriminilitas | Persen | 100 |
| SASARAN 7 Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Indeks Gini | Persen | 0,25 |
| Pertumbuhan ekonomi | Persen | 5.6- 5.7% |
| SASARAN 8 Meningkatnya investasi daerah | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Pertumbuhan Investasi | Persen | 15 |
| SASARAN 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Persentase Penduduk Miskin | Persen | 5 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 2,27 |
| SASARAN 10 Meningkatnya kemandirian desa | | |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 |
| Indeks Desa Membangun | Skala | 0,698 (Berkembang) |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mamuju tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku pengemban amanah masyarakat Mamuju melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Mamuju.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 2022-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI | | |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | Lebih dari 100 | Sangat Baik |
| 2 | 75 – 100 | Baik |
| 3 | 55 – 74 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 6 (Enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, dengan 16 (enam belas) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja.

Mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;

3. Misi III terdapat 1 tujuan,1 sasaran dan 6 indikator kinerja;
4. Misi IV terdapat 1 tujuan,1 sasaran dan 2 indikator kinerja;
5. Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja.

Tabel III.2
Pencapaian Indikator Sasaran

| NO. | MISI | JUMLAH TUJUAN | JUMLAH SASARAN STRATEGIS | JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | Misi1 | 1 | 2 | 4 | BS=0, B=3, C=0, K=1 |
| 2 | Misi2 | 1 | 2 | 4 | BS=2, B =2, C=0, K=0 |
| 3 | Misi3 | 1 | 1 | 6 | BS=5, B=0, C= 0, K=1 |
| 4 | Misi4 | 1 | 1 | 2 | BS=0, B =2, C=0, K=0 |
| 5 | Misi5 | 2 | 4 | 6 | BS=2, B =2, C=2, K=0 |
| | JUMLAH | 6 | 10 | 22 | BS=9, B=9, C=2, K=2 |

Dari 10 (Sepuluh) sasaran dengan 22 (Dua Puluh Dua) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah:

Tabel III.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No. | Kategori | Jumlah Indikator Sasaran | Persentase |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Misi I (4 Indikator Sasaran) | | | |
| 1 | Baik Sekali | 0 | 0 |
| 2 | Baik | 3 | 75 |
| 3 | Cukup | 0 | 0 |
| 4 | Kurang | 1 | 25 |

| No. | Kategori | Jumlah Indikator Sasaran | Persentase |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| | Jumlah | 4 | 100 |
| Misi II (4 Indikator Sasaran) | | | |
| 1 | Baik Sekali | 2 | 50 |
| 2 | Baik | 2 | 50 |
| 3 | Cukup | 0 | 0 |
| 4 | Kurang | 0 | 0 |
| | Jumlah | 4 | 100 |
| Misi III (6 Indikator Sasaran) | | | |
| 1 | Baik Sekali | 5 | 83,33 |
| 2 | Baik | 0 | 0 |
| 3 | Cukup | 0 | 0 |
| 4 | Kurang | 1 | 16,67 |
| | Jumlah | 6 | 100 |
| Misi IV (2 Indikator Sasaran) | | | |
| 1 | Baik Sekali | 0 | 0 |
| 2 | Baik | 2 | 100 |
| 3 | Cukup | 0 | 0 |
| 4 | Kurang | 0 | 0 |
| | Jumlah | 2 | 100 |
| Misi V (6 Indikator Sasaran) | | | |
| 1 | Baik Sekali | 2 | 33,33 |
| 2 | Baik | 2 | 33,33 |
| 3 | Cukup | 2 | 33,34 |
| 4 | Kurang | 0 | 0 |
| | Jumlah | 6 | 100 |

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik Sekali, 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,98 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen dikategorikan Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 bermakna Baik, menurun sebesar 7,65 persen jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.

B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | CC | B | B | 100 |
| 2 | Indeks Pengelolaan keuangan Daerah | Peringkat / Nilai | Sangat Perlu Perbaikan / C | Baik / A | Perlu Perbaikan / B | 75 |
| 3 | Nilai LPPD | Skor | Rendah | Sangat Tinggi | Sedang | 50 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 75 |

Pada sasaran Strategis 1 Indeks Reformasi Birokrasi ini disebutkan realisasi pada tahun 2024 adalah Predikat B dari target Daerah Predikat B dengan persentase capaian sebesar 100 persen capaian tersebut masih merupakan angka sementara pada Daerah Kabupaten Mamuju. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 yaitu dengan predikat CC atau dengan persentase capaian sebesar 75 persen dilihat terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini menggambarkan adanya peningkatan realisasi kinerja pemerintah Kabupaten Mamuju.

Dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada saat penyusunan lakip dalam tahapan masa sanggah yang terpublish di portal RB dengan uraian RB General memperoleh Indeks 59,98 sedangkan RB Tematik memperoleh indeks 9,59 sehingga Total nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah 69,57 atau Predikat B.

Pelaksanaan Reformasi birokrasi general di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memasuki tahun ke-2 pelaksanaan berdasarkan road map RB nasional yang telah mengalami perubahan. Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengupayakan perbaikan-perbaikan demi tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi general di tingkat mikro. Upaya perbaikan yang dilakukan terlihat dari penetapan Indikator Penilaian yang terdiri atas 24 kegiatan utama dan 5 Reformasi Birokrasi Tematik di tahun 2024 untuk menjawab rekomendasi dan tindaklanjut atas laporan hasil evaluasi serta permasalahan strategis yang terjadi di lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju yaitu sebagai berikut :

| Indikator Penilaian | Bobot | Skor | Skor Index |
|--|--------------|-------------|-------------------|
| Rencana Aksi Pembangunan RB General | 3 | 2,42 | 2,42 |
| Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General | 7 | 82 | 4,63 |
| Tingkat Capaian Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi | 3 | 4 | 2,4 |
| Tingkat Maturitas SPIP | 4 | 3,15 | 2,52 |
| Tingkat Maturitas SPIP | 4 | 3,15 | 2,52 |
| Nilai SAKIP | 4 | 62,97 | 2,52 |
| Tingkat Digitalisasi Arsip | 2,5 | 31,58 | 0,79 |
| Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan | 2,5 | 2 | 1 |

| | | | |
|---|-----|-------|------|
| Indeks Kualitas Kebijakan | 2,5 | 0 | 0 |
| Indeks Reformasi Hukum | 2,5 | 97,16 | 2,43 |
| Indeks Pembangunan Statistik | 2,5 | 1,94 | 0,97 |
| Indeks Tata Kelola Pengadaan | 2,5 | 68,81 | 1,72 |
| Indeks Sistem Merit | 4 | 158 | 1,54 |
| Indeks Pelayanan Publik | 2 | 2,87 | 1,15 |
| Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | 2 | 84,4 | 1,69 |
| Indeks SPBE | 9 | 2,42 | 4,35 |
| Capaian IKU Makro | 4 | 94,99 | 3,8 |
| Capaian IKU Non Makro | 6 | 68 | 2,57 |
| Opini BPK | 5 | 3 | 5 |
| Tindak Lanjut Rekomendasi | 4 | 61,92 | 2,48 |
| Indeks BerAkhlak | 4 | 57,25 | 2,29 |
| Survei Penilaian Integritas | 10 | 65,45 | 6,54 |
| Survei Kepuasan Masyarakat | 8 | 89,59 | 7,17 |
| Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan) | 1 | 0,73 | 0,73 |
| Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan) | 1 | 0,75 | 0,75 |
| Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan) | 1 | 0,68 | 0,68 |
| Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan) | 1 | 0,62 | 0,62 |
| Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan) | 1 | 0 | 0 |
| Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak) | 3 | 1,85 | 1,85 |
| Realisasi Investasi (Capaian Dampak) | 3 | 1,87 | 1,87 |
| Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak) | 3 | 0,86 | 0,86 |
| Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak) | 3 | 2,23 | 2,23 |
| Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak) | 3 | 0 | 0 |
| Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | 2,5 | 0 | 0 |

Hasil penilaian Indikator Reformasi Birokrasi terdapat 3 indikator penilaian yang yang belum mendapatkan skor. Pada indeks reformasi hukum baru akan dilaksanakan tahun 2025 dan

pada Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE sampai saat ini belum di implementasikan sebab masih dalam tahap penyusunan regulasi untuk penetapan regulasi arsitektur SPBE dilaksanakan di Kabupaten Mamuju. Sedangkan pada Indikator penilaian Pengendalian Inflasi masih dalam tahap sanggah, karena Kemenpan RB memberikan kesempatan kepada K/L/D untuk melakukan sanggah terhadap hasil evaluasi RB. Pemkab Mamuju ikut melakukan sanggah terhadap Nilai RB Tematik Inflasi dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan pengendalian inflasi di kabupaten Mamuju. Hasil akhir Evaluasi RB pasca sanggah belum keluar saat laporan ini terbit.

Diharapkan melalui Reformasi Birokrasi ini dapat mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Mamuju pada sisi perencanaan melakukan penyelarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi daerah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan dilakukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah se kabupaten mamuju, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh Masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju.

Pada Indikator kedua yaitu Indeks Pengelolaan keuangan Daerah dijelaskan bahwa Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 Tahun Ukur 2024 untuk capaian pemerintah Kabupaten Mamuju diperoleh peringkat Perlu Perbaikan dengan Nilai B, capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan capaian peringkat Sangat Perlu

Perbaikan dengan Nilai C. Hal ini menunjukkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dalam regulasi tersebut menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur penilaian, adapun uraian dari Enam dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran

Secara umum, pemerintah daerah telah senantiasa melakukan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran (RPJMD-RKPD-KUA/PPAS-APBD). Namun, seiring dengan pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut, terdapat kebijakan-kebijakan yang terlambat ditetapkan sehingga mengakibatkan ada ketidaksesuaian dari jumlah program/kegiatan/sub kegiatan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.

APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2024 mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat mandatory (belanja wajib) dengan penyediaan alokasi Belanja fungsi Pendidikan sebesar 34,05 persen dari total APBD, penyediaan alokasi urusan kesehatan sebesar 21,79 persen dari total APBD setelah dikurangi belanja gaji pokok ASN dan belanja untuk infrastruktur sebesar 28,80 persen dari total APBD setelah dikurangi belanja transfer sementara untuk alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal hanya sebesar 4,82 persen dari total APBD.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju telah diunggah dan dapat diunduh pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju kecuali beberapa dokumen yang belum ditetapkan seperti LRA Audited, Opini BPK dan dokumen lainnya.

4. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dari belanja operasional sebesar 84,13 persen dan belanja transfer sebesar 99,51 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 dan Untuk belanja modal sebesar 87,12 persen hal ini disebabkan terdapat beberapa belanja modal yang dianggarkan melalui APBD Perubahan Tahun 2024 sehingga waktu penyelesaian pekerjaan melampaui tahun berjalan yang berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran. Sementara untuk belanja tidak terduga mencapai 35 persen.

5. Kondisi Keuangan Daerah

Pada kondisi keuangan daerah pemerintah kabupaten mamuju senantiasa menjaga kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya antara lain pada Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, dan Solvabilitas Layanan, dalam mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pemerintah Kabupaten Mamuju dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan.

Sebagai laporan perbaikan data, kami laporkan bahwa dalam dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebelumnya pada indikator IPKD menggunakan satuan 'Predikat' dan capaian 'BAIK'. Namun, dalam proses validasi data selanjutnya ditemukan bahwa satuan yang benar adalah 'Peringkat' dengan capaian 'Sangat Perlu Perbaikan / C'. sehingga di laporan ini dilakukan perbaikan pada satuan dan capaian indikator tahun 2023 dan melakukan validasi data secara menyeluruh agar data yang dihasilkan lebih valid dan diinterpretasikan dengan benar.

Sedangkan pada Indikator ketiga yaitu Nilai LPPD diuraikan bahwa Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional. Namun, setelah

melakukan koordinasi secara lisan dengan Tim EKPPD Pusat dan hasil evaluasi tim EKPPD Provinsi dapat digambarkan capaian nilai LPPD kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah Sedang kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya Sangat Rendah. Meskipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah kabupaten Mamuju pada tahun 2024 yaitu 'Sangat Tinggi'.

Pemerintah kabupaten mamuju dalam rangka peningkatan nilai LPPD telah melakukan beberapa upaya dalam mencapai target tersebut yaitu melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengumpulan data IKK terkait penyusunan dokumen LPPD selanjutnya melakukan pendampingan langsung ke perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan LPPD, hal ini disebabkan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya adalah kurangnya pemahaman SDM pelaksana di perangkat daerah dan keterlambatan dalam pelaporan data.

Untuk meningkatkan capaian indikator di masa mendatang, pemerintah kabupaten Mamuju akan mengambil beberapa langkah antara lain dengan melakukan analisis lebih dalam terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target, menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif, meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan peningkatan kompetensi SDM.

Tabel III.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|----------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor | 78,75 | 90 | 76,74 | 85,26 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 85,26 |

Pada sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ini disebutkan realisasi pada tahun 2024 adalah 76,74 persen, dengan persentase capaian sebesar 85,26 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya sebesar 78,75 atau dengan

persentase capaian sebesar 87,50 persen hal ini terdapat penurunan yang tidak terlalu signifikan namun tetap menjadi suatu acuan bagi pemerintah Kabupaten Mamuju untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

secara umum masyarakat merasa puas dengan layanan publik yang diberikan oleh Kabupaten Mamuju Dengan nilai IKM sebesar 76,74 persen, dengan persentase capaian sebesar 85,26 persen, layanan di Kabupaten Mamuju ini sudah memenuhi standart yang diharapkan masyarakat, terutama dalam hal Biaya/Tarif, yang mencerminkan transparansi dan kewajaran biaya dalam pelayanan. Unsur waktu penyelesaian masih menjadi perhatian, yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap durasi layanan. waktu penyelesaian sering kali menjadi faktor yang paling dipermasalahkan dalam layanan publik di Kabupaten Mamuju. Tingkat kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara harapan dan kenyataan, Ketika waktu penyelesaian tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, kepuasan mereka terhadap layanan jadi menurun. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan maka Kabupaten Mamuju perlu melakukan reformasi atau perbaikan maupun berinovasi dalam hal waktu penyelesaian layanan, misalnya dengan memperbaiki sistem antrean digital dan meningkatkan jumlah tenaga kerja pada jam-jam sibuk. Pada permasalahan ini maka penggunaan Aplikasi berbasis Komputer dalam pengolahan data terbukti mempercepat analisis data dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengukuran IKM dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil.

Analisis Berdasarkan rata-rata capaian yang sebesar 85,26 persen, maka Sesuai dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Kabupaten Mamuju berjalan dengan optimal, namun akan tetap dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan. yang mana jika hal ini tidak ditangani maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini :

- a. Rendahnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
- b. Reputasi Kinerja yang lemah karena dianggap kurang berkualitas atau kurang relevan terhadap masyarakat.

beberapa pihak yang terdampak diantaranya :

- Masyarakat : kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai program studi, membuat mahasiswa yang pada prodi politik tidak paham secara mendalam terhadap jurusan yang dipilih.
- Petugas Pelayanan: Petugas akan terkendala dalam memenuhi beban kinerja karena rasio antara jumlah Aparat / Tenaga kerja pelayanan tidak sesuai dengan jumlah warga yang terlayani.
- Unit kerja : kurangnya penerapan Manajemen yaitu peran Petugas dalam melaksanakan pelayanan yang profesional diantaranya Pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan, Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani, Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan, Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan serta Kemanan Pelayanan.

Evaluasi Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,14. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.6
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 7 (Tujuh) Unsur Pelayanan

| Kode Unsur | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata | NRR Tertimbang |
|------------|--|-----------------|----------------|
| U1 | Efektivitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR | 2,96 | 0,42 |
| U2 | Informatif tidaknya konten media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju (Facebook & Instagram) | 3,10 | 0,44 |
| U3 | Berita positif yang tersebar mengenai Pemerintah Kabupaten Mamuju | 3,54 | 0,51 |
| U4 | Efektivitas informas keliling | 2,94 | 0,42 |
| U5 | Kemudahan dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) | 3,15 | 0,45 |
| U6 | Kepuasan dalam layanan pembuatan Kartu Mamuju Keren(KMK) | 2,69 | 0,38 |
| U7 | Kepuasan atas layanan pembuatan <i>Sub Domain</i> Resmi Pemerintah | 3,09 | 0,44 |
| | Nilai Indeks | | 3,069 |
| | Nilai SKM setelah dikonversi (Nix25) | | 76,74 |

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kabupaten Mamuju memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,069 atau 76,74. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Mamuju masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau Baik. Indeks Kepuasan tersebut merupakan komposit dari indeks 7 (Tujuh) unsur pelayanan yang ditanyakan, dengan nilai rata-rata unsur pelayanan berada pada angka 2,69 – 3,54.

Dari ketujuh unsur yang dinilai, semuanya masuk dalam kategori Baik seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Unsur efektivitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR dengan nilai 2,96.
2. Unsur informatif tidaknya konten media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju (Facebook & Instagram) dengan nilai 3,09.
3. Unsur berita positif yang tersebar mengenai Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan nilai 3,54.
4. Unsur efektivitas informasi keliling dengan nilai 2,94.
5. Unsur kemudahan dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan nilai 3,15.
6. Unsur kepuasan dalam layanan pembuatan Kartu Mamuju Keren (KMK) dengan nilai 2,69.
7. Unsur kepuasan atas layanan pembuatan *Sub Domain* Resmi Pemerintah dengan nilai 3,09.

Sesuai dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Kabupaten Mamuju berjalan dengan optimal, namun akan tetap dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dapat kita simpulkan Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju, serta mengevaluasi pelayanan guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kabupaten Mamuju sebesar 3,069 atau 76,74 dengan mutu pelayanan B atau mutu kinerja Baik.
2. Unsur-unsur pelayanan yang bemutu Baik adalah semua dari ketujuh unsur pelayanan yang ada di Kabupaten Mamuju, yaitu efektivitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR; informatif tidaknya konten media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju (Facebook & Instagram); Berita positif yang tersebar mengenai Pemerintah Kabupaten Mamuju; efektivitas informasi keliling; kemudahan dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE); kepuasan dalam layanan pembuatan Kartu Mamuju Keren (KMK); dan kepuasan atas layanan pembuatan Sub Domain Resmi Pemerintah.

Tabel III.7

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Pembangunan Infrastruktur | Persen | 72 | 70 | 78 | 111,43 |
| 2 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Persen | 68 | 70 | 82 | 117,14 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 114,28 |

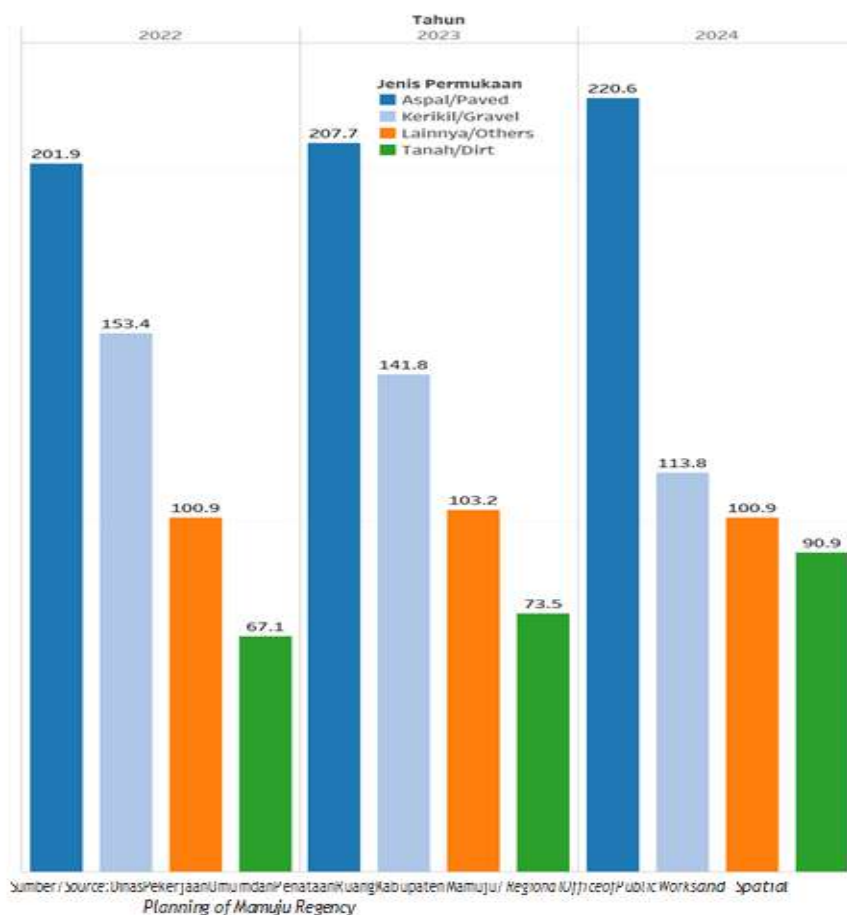
Pada 2024 untuk Sasaran Strategis 5 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah, pada indikator pertama yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur. Kabupaten Mamuju lebih fokus pada Infrastruktur Jalan, Jembatan, Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan, juga Fasilitas Infrastruktur. dimana tujuan tersebut untuk memprioritaskan peningkatan konektivitas antar wilayah, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Dengan realisasi Indikator sebesar 78 persen dari target 70 persen atau disimpulkan capaian kinerja sebesar 111,43 persen.

Bila Dibandingkan pada Tahun sebelumnya Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mamuju mengalami Peningkatan yang dimana hal tersebut dapat terlihat pada capaian realisasi pada tahun 2023 sebesar 72 persen dari target 60 persen, meningkat pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 78 persen dari target sebesar 70 persen.

diuraikan bahwa Jalan merupakan infrastruktur vital yang menunjang aktivitas perekonomian. Keberadaan jalan yang berkualitas berperan penting dalam mendukung pembangunan, terutama dalam mempermudah mobilitas penduduk serta memperlancar arus barang antar daerah.

Pada tahun 2024, panjang jalan di Kabupaten Mamuju mencapai 849,04 kilometer. Dari total tersebut, 114,52 kilometer berada di bawah wewenang negara, 208,35 kilometer di bawah wewenang provinsi, dan 526,17 kilometer di bawah wewenang kabupaten. Berdasarkan jenis permukaan, jalan beraspal sepanjang 220,55 kilometer, jalan berkerikil 113,83 kilometer, jalan tanah 90,93 kilometer, serta jalan dengan kategori lainnya mencapai 100,86 kilometer.

Grafik III.1
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Mamuju, 2022-2024



sedangkan pada indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Kualitas Layanan Infrastruktur dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Indeks Kepuasan Kualitas Layanan Infrastruktur menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju.

Penilaian berdasarkan persepsi masyarakat yang dituangkan dan dianalisis secara kuantitatif. disebutkan pula realisasi atau capaian pada indikator kedua ini adalah sebesar 82 Persen atau dengan capaian sebesar 117,14 persen. perbandingan dengan tahun sebelumnya atau pada tahun 2023 terlihat jelas peningkatan Indeks Kepuasan Kualitas Layanan Infrastruktur yang dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 68 persen dari target 60 persen, sedangkan pada tahun 2024 didapatkan hasil persentase realisasi sebesar 82 persen dari target 70 persen.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju. Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi.

Tabel III.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|----------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 77,64 | 80 | 74,66 | 93,32 |
| 2 | Indeks Resiko Bencana | Predikat | Tinggi | Sedang | Sedang | 100 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 96,66 |

Untuk indikator sasaran satu Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup. Mendasari Rancangan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu berupa penguatan sistem pemantauan kualitas

lingkungan hidup; penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup dan penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

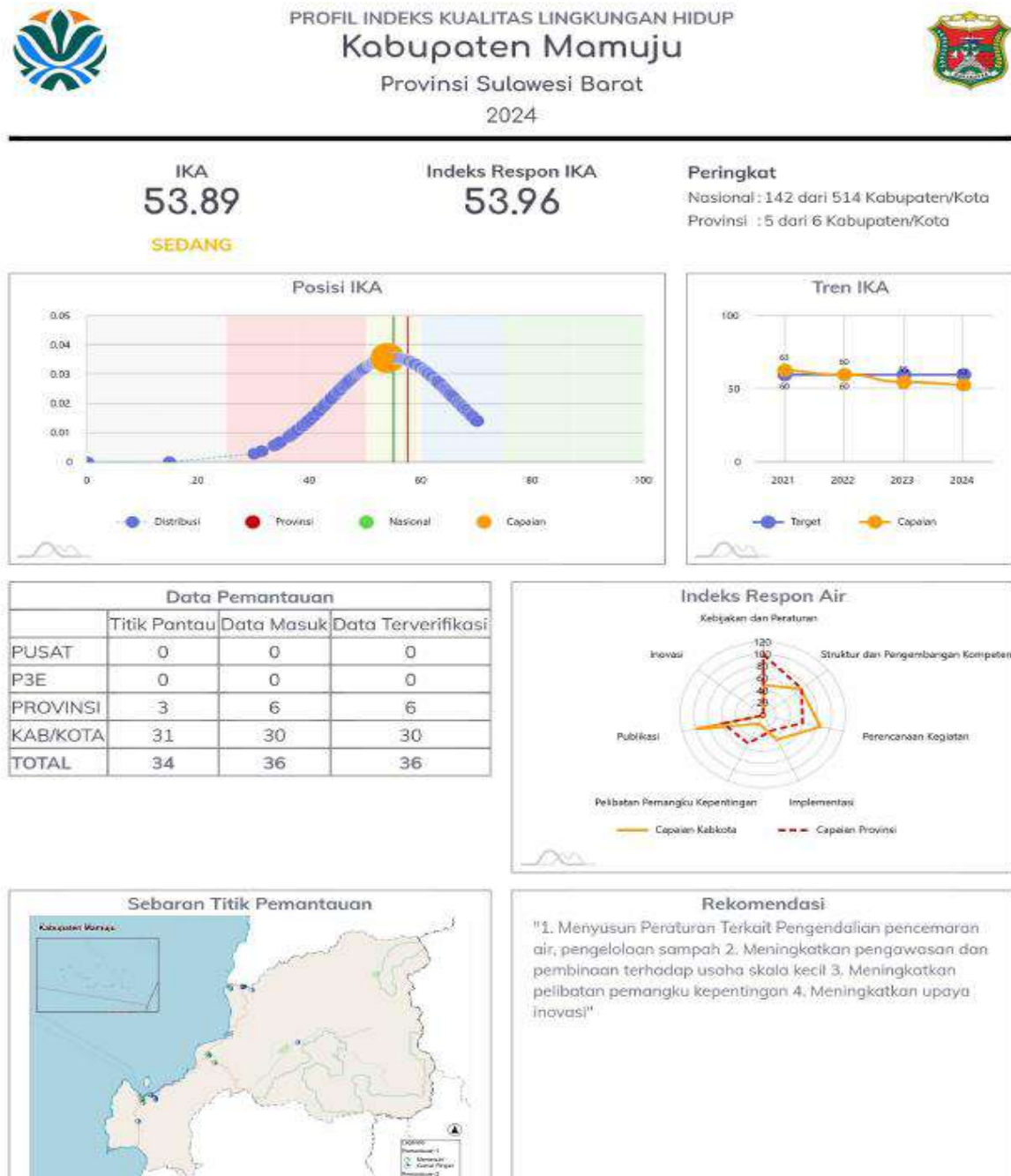
Pada kabupaten Mamuju ditahun 2024 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 93,32 persen berdasarkan Realisasi Indikator Sasaran sebesar 74,66 persen diperbandingkan dengan Target sebesar 80,00 persen.

Berdasarkan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.9
Perbandingan Target dan Capaian IKLH Kabupaten Mamuju tahun 2024

| No | Jenis Indeks | Target | Capaian | Kriteria | Keterangan |
|----|---|--------|---------|----------|-----------------------|
| 1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 60,3 | 53,89 | Sedang | Belum memenuhi target |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 89,79 | 88,96 | Baik | Memenuhi target |
| 3 | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 85,11 | 83,88 | Baik | Belum memenuhi target |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 77,68 | 77,64 | Baik | Belum memenuhi target |

Gambar 3.1
Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju tahun 2024





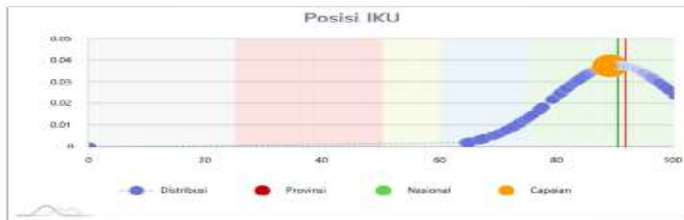
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat
2024



IKU
88.96
BAIK

Indeks Respon IKU
35.79

Peringkat
Nasional : 308 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 6 dari 6 Kabupaten/Kota



| | Titik Pantau | Data Masuk | Data Terverifikasi |
|----------|--------------|------------|--------------------|
| PUSAT | 6 | 9 | 9 |
| P3E | 0 | 0 | 0 |
| PROVINSI | 0 | 0 | 0 |
| KAB/KOTA | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 9 | 9 |



Rekomendasi

Capaian IKU tidak memenuhi target, perlu dilakukan program kegiatan PPU yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi serta perlu penambahan titik pantau di lokasi yang kualitas udaranya baik. Meningkatkan inovasi dan publikasi dengan melibatkan peran aktif masyarakat/swasta/pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran udara.



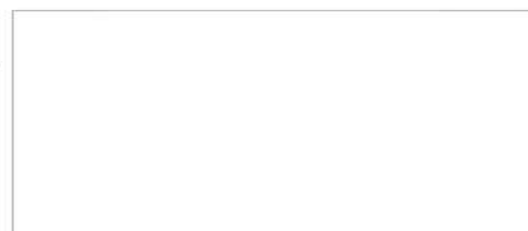
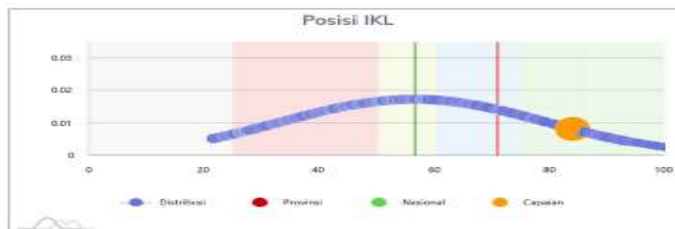
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat
2024



IKL
83.88
BAIK

Indeks Respon IKL
33.00

Peringkat
Nasional : 51 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 1 dari 6 Kabupaten/Kota





PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat
2024



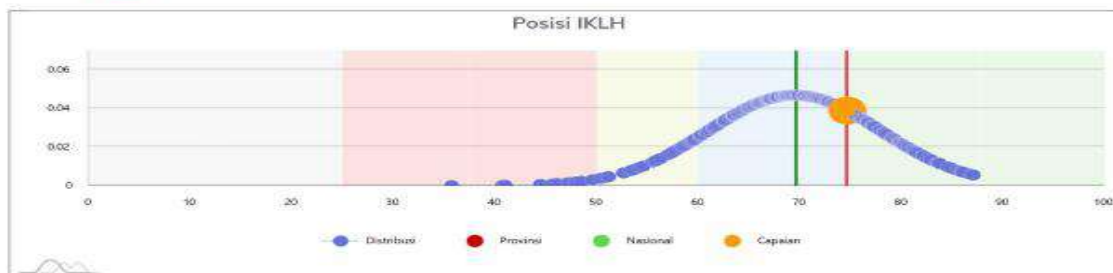
Kepala Daerah : Hj. Siti Sutinah Suhardi, SH, M.Si.
Luas Wilayah : 4979.89 Km²
Populasi : 292395 Jiwa

Kepala DPRD : Azwar Anshari Habsi
Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL
Pendapatan Per Kapita : -

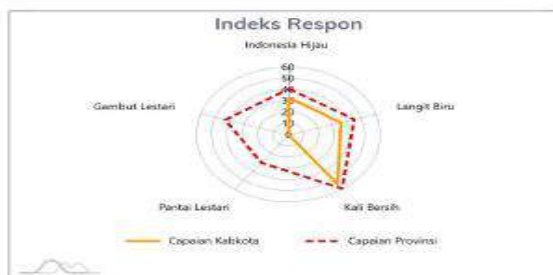
IKLH
74.66
BAIK

Indeks Respon
31.91

Peringkat
Nasional : 127 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 4 dari 6 Kabupaten/Kota



| Data Pemantauan | | | |
|-----------------|--------------|------------|--------------------|
| | Titik Pantau | Data Masuk | Data Terverifikasi |
| UDARA | 6 | 9 | 9 |
| AIR | 34 | 36 | 36 |
| LAHAN | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 40 | 46 | 46 |



Dari gambar Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diatas maka dapat diuraikan bahwa :

1. Capaian IKLH kabupaten Mamuju termasuk dalam kategori baik dan menempati peringkat nasional : 127 dari 514 kabupaten/kota, dan peringkat : 4 dari 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat,
2. Beberapa catatan terkait dengan capaian IKLH kabupaten Mamuju tahun 2024 :
 - a. Tidak tercapainya nilai IKA dikarenakan air sungai yang menjadi titik sampel telah masuk dalam kategori “camar ringan”.

Jumlah sungai yang menjadi sampel sebanyak 10 (sepuluh) sungai, dan dari masing-masing sungai diambil 3 (tiga) titik sampel yang mewakili titik hulu,

tengah dan hilir sungai. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel 10 air sungai dari masing-masing titik sampel diketahui bahwa untuk parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD) pada seluruh sungai yang dipantau, diketahui nilai hasil uji seluruh sungai telah melebihi standar baku mutu air sungai. Selain itu, untuk parameter Total Suspended Solid (TSS) pada 10 sungai yang dipantau, terdapat 6 (enam) sungai dengan nilai hasil uji telah melebihi standar baku mutu air sungai. Begitu pula dengan parameter Chemical Oxygen demand (COD) dari 10 sungai yang dipantau, 5 sungai diantaranya untuk nilai COD telah melebihi standar baku mutu air sungai.

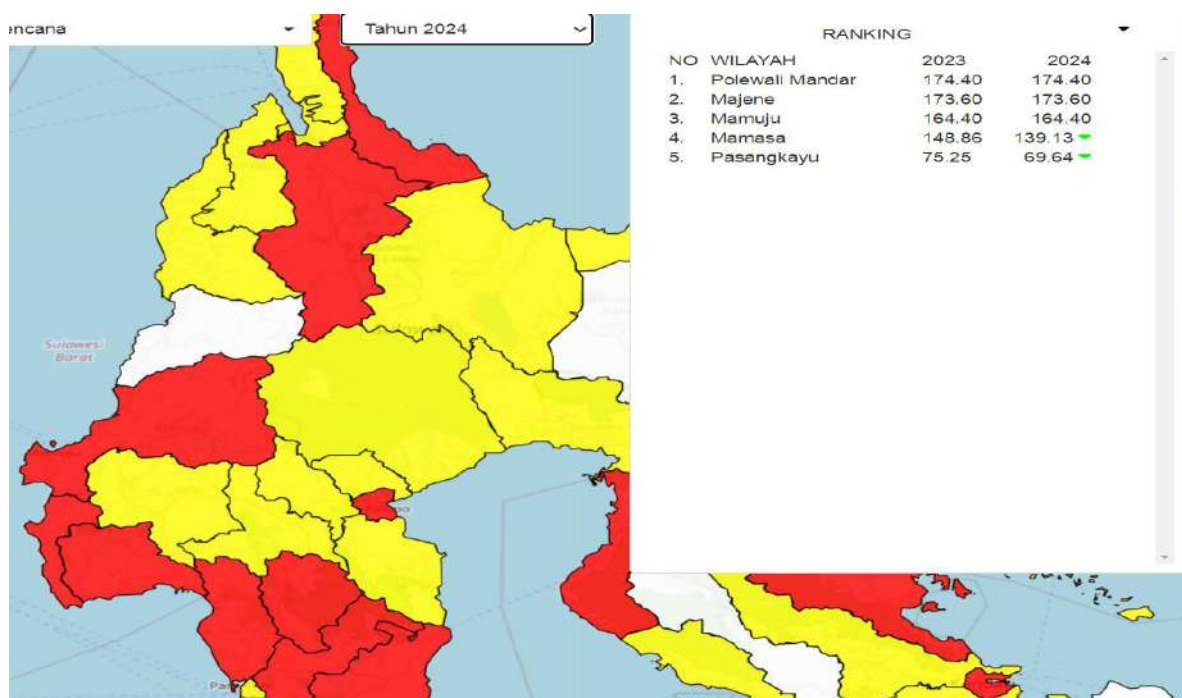
- b. Untuk memastikan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi nilai hasil uji air limbah melebihi standar baku mutu perlu penelitian lebih lanjut. Secara hipotetik, nilai BOD, COD dan TSS yang melebihi baku mutu dapat disebabkan oleh cemaran air limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai, cemaran limbah pertanian seperti pupuk, pestisida, ; atau terjadinya perubahan alamiah seperti erosi, pada daerah2 tertentu pada bagian sungai,
 - c. Untuk Parameter Indeks Kualitas Lahan, juga masih belum memenuhi target, dikarenakan belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kabupaten Mamuju. Kondisi ini menyulitkan untuk menentukan luasan kawasan RTH kabupaten Mamuju. Selain itu, keterbatasan sumber data dukung seperti peta kawasan tutupan lahan terbaru juga mempengaruhi kemampuan untuk identifikasi kawasan RTH Mamuju
 - d. Untuk Parameter indeks kualitas udara telah memenuhi target yang ditetapkan, untuk itu perlu dipertahankan dengan mengurangi perubahan fungsi lahan, khususnya kawasan hutan dan RTH serta Sabuk Hijau (*Green belt*) kabupaten Mamuju, sehingga kemampuan tegakan hutan, RTH serta sabuk hijau dalam mengurangi polusi tidak berkurang.
3. Untuk perbaikan IKLH kabupaten Mamuju kedepan, adalah perlunya melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui faktor- faktor penyebab parameter air sungai melebihi baku mutu. Data tersebut penting sebagai acuan untuk formulasi kebijakan perbaikan kualitas air sungai sekaligus menjaga kualitas air sungai semakin

baik. Kualitas air sungai yang baik sangat penting untuk mendukung kualitas hidup yang baik bagi setiap rumah tangga.

4. Perlu penguatan kebijakan hukum terkait dengan penetapan kawasan RTH. Hal ini penting untuk mengetahui apakah luasan RTH kabupaten Mamuju telah sesuai dengan standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan juga sekaligus untuk mencegah perubahan fungsi kawasan RTH.

Pada indikator kedua dijelaskan bahwa Pada Tahun 2024 indikator Indeks Resiko Bencana di kabupaten mamuju mendapatkan predikat Sedang, hal ini berbanding lurus dengan Target Daerah dengan Status Predikat Sedang dengan realisasi Status Predikat Sedang atau dengan hasil capaian Kinerja 100 persen.

Gambar 3.2
Peta Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024



Sumber Data : InaRISK

Prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah menurunkan tingkat risiko bencana dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan dan tindakan-tindakan untuk penanggulangan bencana. Pada dasarnya, penerapan kebijakan dan tindakan tersebut membutuhkan kerjasama multi

pihak dari pemerintah daerah, instansi dan elemen yang terkait. Optimalitas upaya penanggulangan bencana tersebut perlu disinkronisasi dengan kebijakan tingkat nasional.

Dalam Upaya penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Mamuju merumuskan berdasarkan hasil analisis tingkat ketahanan daerah terhadap bencana yang telah disesuaikan dan disepakati pada RENAS PB dalam 7 (tujuh) kelompok kegiatan. Penyusunan program kegiatan tersebut dilihat dari kondisi daerah yang perlu ditingkatkan yang dituangkan serta rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan untuk pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih sistematis.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang tertuang didalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, bahwa strategi yang digunakan untuk penurunan indeks risiko bencana adalah meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan melaksanakan 71 indikator ketangguhan yang dikelompokkan menjadi 7 prioritas yang terdiri dari :

1. Penguatankebijakandan kelembagaan
 - a. Perda tentang PB
 - b. Pembentukan BPBD
 - c. Pembentukan forum PRB
 - d. Peraturan tentang penyebaran Info PB
 - e. Kebijakan daerah tentang RPB
 - f. Perda tentang tata ruang berbasis PRB
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
 - a. Peta bahayadankajiannyauntukseluruhbahayayangadadi daerah
 - b. Peta kerentanan dan kajiannya untukseluruhbahaya yang ada di daerah
 - c. Peta kapasitas dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
 - d. Rencana penanggulangan bencana
3. Pengembangan sistem informasi,diklat dan logistik
 - a. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
 - b. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
 - c. Komunikasi bencana lintas lembaga

- d. Pusdal ops PB
 - e. Sistem pendataan bencana
 - f. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
 - g. Penyelenggaraan Gladi PB
 - h. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik bencana
 - i. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik bencana
 - j. Penyimpanan / gudang logistik
 - k. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara priodik
 - l. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
- a. Penataan ruang berbasis PRB
 - b. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
 - c. Sekolah/Madrasah aman bencana
 - d. Rumah sakit / puskesmas aman bencana
 - e. Desatangguh bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
- a. Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir
 - b. Perlindungan daerah tangkapan air
 - c. Restorasi Sungai
 - d. Penguatan Lereng (Termasuk tindakan sipil teknis di kawasan DAS rawan longsor)
 - e. Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
 - f. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
 - g. Pemantauan berkala hulu sungai
 - h. Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi
 - i. Tanaman dan / atau bangunan penahan gelombang tsunami
 - j. Revitalisasi tanggul,embung,waduk dan taman kota
 - k. Restorasi lahan gambut
 - l. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor

6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
 - a. Rencana Kontijensi perancangan
 - b. Sistem Peringatan Dini perancangan
 - c. Jalur dan tempat evakuasi sementara
 - d. Penentuan status tanggap darurat
 - e. Penerapan sistem komando operasi darurat
 - f. Pengerahan Tim Kaji Cepat kelokasi bencana
 - g. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
 - h. Perbaikan Darurat
 - i. Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh
 - j. Penghentian status Tanggap Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana
 - a. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
 - b. Pemulihan infrastruktur penting
 - c. Perbaikan rumah penduduk
 - d. Pemulihan Penghidupan Masyarakat

Tabel III.10

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Persen | 69,61 | 68,70 | 71,86 | 104,59 |
| 2 | Indeks Pendidikan | Skala | 0,64 | 0,42 | 0,64 | 152,38 |
| 3 | Indeks Kesehatan | Skala | 0,748 | 0,578 | 0,802 | 138,75 |
| 4 | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) | Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun | 10,075 | 32.500 | 10.440 | 32,12 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|
| 5 | Indeks Pemberdayaan Gender | Persen | 60,59 | 59,87 | 60,96 | 101,82 |
| 6 | Indeks Kesejahteraan Sosial | Persen | 53 | 65 | 77 | 118 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 107,94 |

Pada Indikator pertama pada sasaran Strategis ini Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan bahwa Capaian kualitas hidup tercermin melalui IPM. Tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Mamuju sebesar 71,86. Capaian Kinerja indikator ini sebesar 104,59 yang dimana realisasi Indikator sebesar 71,86 melebihi dari target sebesar 68,70.

Apabila diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 di kabupaten mamuju terjadi peningkatan sebesar 2,22 digit dimana disebutkan pada tahun sebelumnya sebesar 69,64 meningkat menjadi 71,86.

Berdasarkan analisa maka dipaparkan bahwa Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, adapun beberapa dimensi yang dimaksudkan adalah Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat dimana Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, Dimensi pengetahuan dimana pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, selain itu adapula Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Indonesia mencapai 12,34 juta rupiah per tahun.

Maka disimpulkan bahwa Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. dimana pada dimensi pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 10,440 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,29 persen. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,35 Demikian juga pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 72,13

Indikator kedua pada sasaran Strategis ini hasil capaian Kinerja pada Indeks Pendidikan ini sebesar 152,38 persen, yang dimana hasil tersebut didapatkan dari realisasi indikator sebesar 0,64 dengan besaran target sebanyak 0,42 persen.

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan capaian kinerja yang persentase pada tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 177,77 Persen.

Dari hasil analisa Indeks Pendidikan adalah komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan setiap tahun oleh Program Pembangunan PBB. Selain indikator Ekonomi dan Indeks Harapan Hidup, membantu mengukur pencapaian pendidikan, GNI (PPP) per kapita dan harapan hidup juga digunakan dengan indeks pendidikan untuk mendapatkan IPM masing-masing negara. Sejak 2010, indeks pendidikan telah diukur dengan menggabungkan rata-rata lama sekolah orang dewasa dengan tahun sekolah yang diharapkan untuk siswa di bawah usia 25 tahun.

Pendidikan dianggap sebagai jantung dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pendidikan telah dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka.

Untuk menghadapi kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat kabupaten Mamuju, peserta didik tidak cukup dibekali dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau lebih dikenal dengan sebutan “Tree R” (reading, writing, arithmetic), tetapi juga perlu dibekali kompetensi masyarakat global atau juga disebut kecakapan abad 21, yakni kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi atau dikenal dengan sebutan “Four Cs”, yaitu communicators, creators, critical thinkers, and collaborators.

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review diperoleh berbagai penerjemahan kunci terkait kualitas pendidikan sebagai bentuk layanan pendidikan yang inklusif sebagaimana berikut:

1. Kualitas layanan pendidikan diukur meliputi kualitas sumber daya manusia termasuk kompetensi pedagogi, keberpihakan negara dalam menyediakan regulasi dan

- infrastruktur serta akses biaya, capaian dan capaian lanjutan peserta pendidik,
2. Layanan pendidikan menginterpretasikan perkembangan teknologi sebagai kualitas dialog dan media pembelajaran,
 3. Kualitas layanan pendidikan memiliki dimensi infrastruktur, suprastruktur, dan inter-struktur yang merupakan kolaborasi antara institusi kependidikan,
 4. Kualitas pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang setara untuk setiap gender dengan memastikan keberpihakan pemerintah dalam memberikan akses.

Disimpulkan bahwa Hasil pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 mencapai Skala 0,64 dari target ditahun 2024 sebesar 0,42 capaian indikator ini sama dengan capaian tahun sebelumnya,dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia, maka capaian ini dapat diintepretasikan tinggi.

Pada Indikator ketiga pada sasaran Strategis yakni Indeks Kesehatan ini dijelaskan Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

Realisasi dari Indeks Kesehatan sebesar 0,802 dari target 0,578 dengan kata lain capaian kinerja sebesar 138,75 atau dengan kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi Indeks Kesehatan dengan skala 0,748 dari target skala 0,556 dengan capaian kinerja sebesar 134,53. dari hasil angka tersebut kita dapat melihat terdapat peningkatan meskipun belum signifikan.

Analisis Indikator Indeks Kesehatan sangat diperlukan, meskipun angka kematian di Mamuju termasuk rendah indeks kesehatan dapat mengembangkan pengetahuan tentang dampak kebijakan dan program terhadap kesehatan serta meningkatkan fokus dan efektifitas suatu intervensi dengan mengidentifikasi suatu kebutuhan khusus di sektor kesehatan.

Penyediaan data yang berkualitas memegang peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan termasuk di bidang kesehatan. Data kesehatan yang akurat dan komprehensif menjadi landasan yang kuat untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan berbasis bukti. Data dan informasi kesehatan yang komprehensif akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang profil kesehatan masyarakat, termasuk

determinan sosial ekonomi yang memengaruhi kesehatan serta kelompok-kelompok masyarakat yang perlu menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Terkait hal tersebut pemerintah kabupaten mamuju akan mengoptimalkan penguatan data sektor, sehinggadengan data yang handal, pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan.

Dengan populasi yang terus bertambah, tantangan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Tantangan kesehatan seperti aksesibilitas layanan kesehatan, pemberian vaksin, dan upaya pencegahan penyakit menjadi semakin kompleks. Kondisi geografis dan distribusi usia penduduk sangat menentukan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang perlu dibangun oleh pemerintah. Masyarakat yang menua memerlukan pelayanan kesehatan lanjut usia yang lebih intensif, sementara populasi muda memerlukan fokus pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang demografi penduduk menjadi kunci dalam perencanaan kebijakan kesehatan yang efektif. Melalui analisis demografi, pemerintah kabupaten mamuju dapat mengarahkan investasi dan sumber daya ke sektor kesehatan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap tahap siklus kehidupan. Dengan memahami hubungan antara demografi penduduk dan kesehatan masyarakat, daerah kabupaten mamuju dapat mengembangkan strategi kesehatan yang berkelanjutan dan berfokus pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran kesehatan OOP merupakan pengeluaran yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga untuk pelayanan kesehatan, termasuk biaya konsultasi dokter, pembelian obat, retribusi pelayanan kesehatan, pengobatan alternatif/tradisional, uang gratifikasi atau pembayaran ke praktisi kesehatan atau fasilitas kesehatan, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun menggunakan kartu debit, kredit, atau uang yang berasal dari pinjaman/hutang. Sementara itu, pengeluaran total untuk kesehatan meliputi seluruh pengeluaran kesehatan termasuk yang dibayarkan oleh pihak ketiga seperti asuransi kesehatan (termasuk Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), keluarga, tetangga, teman, kantor, atau pihak lainnya.

Biaya pelayanan pengobatan/kuratif mencakup pengeluaran yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas kesehatan terjaga seoptimal mungkin. Dalam Susenas, biaya pelayanan pengobatan/kuratif ini mencakup pengeluaran untuk pengobatan di RS pemerintah, RS swasta, puskesmas/pustu/polindes/posyandu, praktik dokter/poliklinik, praktik petugas kesehatan (bidan/perawat/mantri Kesehatan), praktik pengobatan tradisional, dan dukun penolong persalinan.

Disimpulkan bahwa dengan Data ini menunjukkan Daerah harus mengatasi kesenjangan cakupan intervensi dan mempercepat kemajuan dalam meningkatkan cakupan dan hasil kesehatan, khususnya dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Indikator keempat pada sasaran Strategis yakni Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) Pada tahun 2023 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) sebesar 10,440 Ribu Rupiah/ Orang/Tahun yang dimana hal tersebut masih dibawah dari target daerah sebesar 32.500 Ribu Rupiah/ Orang/Tahun. Dengan kata lain bahwa Capaian Kinerja pada indikator ini sebesar 32,12 persen.

dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada indikator ini terdapat penurunan capaian yang signifikan, yang dimana hal tersebut sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi di daerah dan masyarakat itu sendiri. dimana pada tahun sebelumnya daerah memberikan target sebesar 24,000 dengan realisasi hanya sebesar 10,075 dan target tersebut naik menjadi 32,500 dengan realisasi hanya sebesar 10,440. Tetapi dapat dilaporkan bahwa capaian untuk realisasi kondisi tahun 2023 yaitu 10,075 meningkat di tahun 2024 sebesar 10,440.

Analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa meskipun faktor ini berkontribusi pada penurunan indeks harga konsumen (IHK), angka deflasi yang signifikan ini merupakan bukti nyata dari melemahnya daya beli masyarakat. Melemahnya kelas menengah ini tak hanya berdampak pada konsumsi, tetapi juga berimbas pada pelambatan sektor usaha yang bergantung pada belanja domestik.

“Kelas menengah memiliki kecenderungan belanja lebih tinggi dari kelas atas, tetapi dengan pendapatan yang lebih stabil dibanding kelas bawah. salah satu penyebab melemahnya daya

beli adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi pemerintah, ketidakpastian yang ditimbulkan memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024, indeks penjualan ritel yang terus menurun sejak kuartal III-2024 menunjukkan bahwa konsumen semakin mengurangi pengeluarannya.

Tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi global, juga semakin menekan margin keuntungan usaha. Akibatnya, beberapa usaha kecil dan menengah (UKM) terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Beberapa di antaranya terpaksa menutup usaha, sementara yang lain harus melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Fenomena ini menimbulkan efek domino, di mana meningkatnya angka pengangguran semakin memperburuk daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan adalah :

1. penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui insentif bagi industri padat karya.
2. penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi bahan pokok yang lebih tepat sasaran.
3. pengendalian harga komoditas strategis dengan memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Penyederhanaan regulasi di tingkat kabupaten dan peningkatan insentif investasi di tingkat pusat dapat menarik lebih banyak modal asing dan domestik untuk mempercepat pertumbuhan industri. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja baru dapat dipercepat dan daya beli masyarakat dapat diperbaiki secara berkelanjutan di wilayah kabupaten mamuju.

Indikator kelima pada sasaran Strategis yakni Indeks Pemberdayaan Gender disebutkan bahwa Dalam Dua tahun terakhir, IDG Kabupaten Mamuju menunjukkan peningkatan

berdasarkan rilis data BPS pada bulan Februari ditahun 2025 untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan data pada tahun 2023 di Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 60,96%. bila dibandingkan dengan target sebesar 59,87 persen maka didapatkan capaian kinerja sebesar 101,82 persen. Sedangkan capaian ini meningkat dari realisasi kondisi tahun 2023 yaitu sebesar 60,59 persen.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya untuk capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mamuju disebutkan sebesar 60,59 persen yang mana terdapat peningkatan sekitar 0,37 Persen. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Analisa pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia makin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini berarti, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan untuk berkecimpung di bidang ekonomi dan politik serta terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan kian menipis. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, Kabupaten Mamuju mendasari empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.

Skor IDG diperoleh dari hasil pengukuran melalui tiga dimensi, yaitu dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen menilik proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif.

Dimensi pengambilan keputusan didasarkan pada proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi. Terakhir, dimensi distribusi pendapatan dinilai dari upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non-pertanian.

Pada Indikator keenam yakni Indeks Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 77 persen dengan persentase capaian sebesar 118 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu 43 persen atau dengan persentase capaian

sebesar 88 persen hal ini terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang menggambarkan adanya peningkatan realisasi kinerja pemerintah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan formulasi pada Indeks Kesejahteraan Sosial berasal dari 40 persen persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30 persen Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30 persen Persentase PSKS yang aktif.

Dijelaskan bahwa PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial yaitu penerima PKH 8.739 jiwa, penerima BNPT 16.324 jiwa, BPJS PBPUPemda 91.997 jiwa, korban bencana alam 1.141 jiwa, dan Korban Bencana Sosial sebanyak 97 jiwa. Sehingga total mencapai 117.157 jiwa. PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi sosial 118 orang yang terdiri dari Layanan permakanan 45 orang, Layanan kesehatan 20 orang dan Layanan pendidikan 53 orang. PSKS yang aktif sebanyak 106 orang terdiri atas pendamping PKH 28 orang, pendamping TKSK 11 orang, pekerja sosial 4 orang, tagana 36 orang dan karang taruna 27 orang.

Dari hasil data indeks kesejahteraan sosial evaluasi yang dilaksanakan kabupaten mamuju dalam rangka pencapaian sosial yaitu mempertimbangkan dimensi kesejahteraan sosial objektif yaitu meningkatkan pelayanan akses ke masyarakat sedangkan untuk sosial subjektif pada peningkatan umur harapan hidup masyarakat selain itu juga pada penanganan pada kelompok rentan.

Tabel III.11
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks ketentraman dan ketertiban | Persen | 99,57 | 100 | 99,65 | 99,65 |
| 2 | Indeks Kriminilitas | Persen | 99,57 | 100 | 99,65 | 99,65 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 99,65 |

Pada tahun 2024 untuk Sasaran Strategis 6 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum mencakup 2 (dua) Indikator yang mendukung dalam Pencapaiannya yakni Indikator Indeks ketentraman dan ketertiban dan Indikator Indeks Kriminalitas.

Dalam pencapaian Kinerja dua indikator sasaran Strategis ini masing-masing memperoleh hasil sebesar 99,65 persen, yang dimana ditahun 2024 tingkat kejahatan di Mamuju cenderung rendah. Hal ini dapat tercermin dari persentase penduduk yang mengalami korban kejahatan hanya sekitar 0,35 persen. Capaian ini tentunya menggembirakan karena sebagai ibukota provinsi, Mamuju masih tergolong dalam wilayah aman.

pada tahun 2024 tingkat kejahatan di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan. Hal ini dapat tercermin dari persentase penduduk yang mengalami korban kejahatan yang menjadi sekitar 0,35 persen pada tahun 2024, yang mana sebelumnya pada tahun 2023 sekitar 0,43 persen. Capaian ini tentunya menggembirakan karena sebagai ibukota provinsi, Mamuju masih tergolong dalam wilayah aman. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dengan runtun waktu 2023-2024, penduduk laki-laki mengalami penurunan, sedangkan penduduk perempuan mengalami peningkatan. Hal ini perlu perhatian pemerintah untuk memperkuat keamanan agar penduduk perempuan lebih nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Analisa pada indikator ini diuraikan bahwa Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusakan, bencana. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat terlindungi sepenuhnya dari bencana alam tiba-tiba, seperti banjir atau perilaku berbahaya orang lain.

Tabel III. 12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 meningkatnya pertumbuhan
sektor- sektor unggulan daerah

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|---------------------|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Gini | Persen | 0,37 | 0,25 | 0,425 | 58,82 |
| 2 | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 4,37 | 5.5-5.6% | 6,47 | 113,50 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 86,16 |

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah pada indikator pertama yakni Indeks Gini diuraikan Pada tahun 2024 Indeks Gini di Kabupaten Mamuju mencapai realisasi sebesar 0,425 persen dari target 0,25 persen dengan kata lain capaian Kinerja dari Indikator Indeks Gini pada tahun 2024 sebesar 58,82 persen yang dimana indeks gini digunakan untuk mengetahui Ketimpangan pendapatan yang merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.

Jika dilihat dari rasio ketimpangan pendapatan, pada tahun 2024 gini rasio di kabupaten mamuju sebesar 0,425 persen. Masih tergolong moderat, namun pemerintah tetap memberi perhatian intensif terhadap masalah ketimpangan. Penurunan ini didukung dengan data lain seperti tingkat kedalaman dan keparahan. Pada tahun yang sama, tingkat kedalaman kemiskinan di kabupaten mamuju sebesar 0,79, membaik dibandingkan tahun 2023 sebesar 0.98. Sementara itu untuk tingkat keparahan angkanya mencapai 0,13 atau turun 0,05 dibandingkan tahun 2023. Kedua angka tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi masyarakat miskin yang semakin mengelompok dan relatif homogen dalam hal variasi pengeluarannya. Informasi ini membuat penentuan strategi penanggulangan dan penanganan kemiskinan menjadi lebih mudah karena karakteristik subjek yang akan ditangani memiliki ciri yang hampir sama. Artinya target penanganan melalui program pemerintah akan lebih terarah.

Pada Indikator kedua Yaitu Pertumbuhan Ekonomi disebutkan bahwa berdasarkan Data Mamuju Dalam Angka Tahun 2025, untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju ditahun 2024 mencapai realisasi 6,47 persen dari target Indikator Sebesar 5.6-5,7 persen atau dengan kata lain Capaian Kinerja sebesar 113,50 persen. bila dibandingkan dengan lima (5) Kabupaten lain di Sulawesi Barat, maka Kabupaten Mamuju menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan capaian tersebut mampu mengalahkan dari capaian Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri dengan jumlah capaian pertumbuhan ekonomi ditahun 2024 sebesar 4,76 persen

Tabel III.13
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (persen) ,2021–2024

| Kabupaten/Kota Regency/Municipality | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|--|------|-------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Majene | 2,13 | 2,38 | 5,29 | 5,30 |
| PolewaliMandar | 1,87 | 3,58 | 4,56 | 5,94 |
| Mamasa | 2,00 | 1,79 | 3,36 | 3,26 |
| Mamuju | 2,35 | 3,28 | 4,47 | 6,47 |
| Pasangkayu | 3,78 | -0,02 | 6,78 | 0,68 |
| MamujuTengah | 3,26 | 2,34 | 2,77 | 2,98 |
| SulawesiBarat | 2,57 | 2,26 | 5,23 | 4,76 |

Sumber data : Mamuju Dalam Angka, 2025

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Sulawesi Barat mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024, dengan beberapa tahun mengalami kontraksi dan beberapa tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, terdapat tren positif dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang cenderung meningkat selama periode tersebut. Pasangkayu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup variatif, termasuk tahun dengan pertumbuhan negatif yang signifikan pada tahun 2020, namun menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun 2024.

Angka tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2024 adalah sekitar 6,47 persen. Pada tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 39,5 persen. yang dimana Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 nampak menguat dibandingkan tahun 2023 yakni naik sekitar 2 persen poin.

dari uraian PDRB diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat/warga dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu (1tahun). PDRB juga merupakan sebagai ukuran laju pertumbuhan perekonomian satu daerah. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

selain itu juga Koperasi memegang peranan penting sebagai alternatif lembaga keuangan yang efektif untuk menjangkau kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Koperasi merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan seluruh anggotanya.

Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundingan terkait dengan pajak dan retribusi.

Dengan adanya penerimaan PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai

tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB nya dari tahun ke tahun.

Tabel III.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya investasi daerah

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|-----------------------|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Pertumbuhan Investasi | Persen | 68,27 | 15 | 45,04 | 300,26 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 300,26 |

Pada Sasaran Strategis 8 Indikator Pertumbuhan Investasi Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju tercatat bahwa Realisasi Pertumbuhan Investasi sebesar 45,04 persen dari target 15 persen atau dengan kata lain Capaian Kinerja sebesar 300,26 persen. tetapi dapat dilaporkan pertumbuhan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan investasi di tahun 2023 yang dimana realisasi di tahun 2023 sebesar 68,27 persen.

Yang dimana merujuk pada Formulasi Penilaian Pertumbuhan Investasi yakni dengan menggunakan rumus CAGR dengan uraian Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Rp) Tahun 2023 Sebesar Rp. 696,827,923,282,- sampai dengan Tahun 2024 Sebesar Rp. 1,010,677,136,227,-. Sehingga diperoleh capaian Kinerja pada Pertumbuhan Investasi Sebesar 300,26 persen.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebutkan bahwa Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dimana telah disebutkan diatas bahwa pada tahun 2023 nilai investasi daerah sebesar Rp. 696,827,923,282,- meningkat pada Tahun 2024 Sebesar Rp. 1,010,677,136,227,-

Analisa dari Pertumbuhan Investasi ini diuraikan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). hal tersebut dapat terjadi disebabkan bertambahnya Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari 73

Perusahaan Penanam Modal di Tahun 2023 menjadi 113 Perusahaan Penanam Modal di Tahun 2024. hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan PMDN terhadap Daerah semakin tinggi.

Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju akan berkontribusi positif pada pertumbuhan dunia usaha daerah melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik daerah dan lokasi daerah yang ditujukan untuk pembangunan industri dan perdagangan. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik dan lokasi ini adalah untuk menciptakan identitas daerah, meningkatkan basis pesona daerah (*amenity base*) dan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan daya tarik pusat kota (*civic center*). Kontrol untuk pembangunan dan perencanaan, Jika dilakukan dengan benar, ini akan meningkatkan iklim investasi di daerah dan meningkatkan citra pemerintah daerah. Selain itu, dibutuhkan pengaturan tata ruang yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Peruntukan lahan harus jelas dan tepat. Misalnya, harus ada kawasan pemukiman, industri, perdagangan, dan hijau, dan Pembangunan Infrastruktur seperti air bersih, listrik, taman, parkir, dan sebagainya sangat menarik bagi calon investor dan dunia usaha.

Sebagai kesimpulan bahwa Kabupaten Mamuju telah melakukan Strategi mengembangkan potensi dan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada prinsipnya adalah upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Mamuju itu sendiri, strategi pertumbuhan dan pembangunan daerah harus terus diterapkan secara berkelanjutan sehingga pemerintah daerah, pemerintah pusat serta masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk mendorong atau bahkan meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi suatu daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif.

Tabel III.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

| Indikator Sasaran | | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------|------------------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 7,57 | 5 | 7,15 | 69,93 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 2,99 | 2,27 | 2,77 | 81, 95 % |
| Rata-rata capaian | | | | | | 75,94 |

Pada Indikator Pertama Persentase Penduduk Miskin disebutkan bahwa berdasarkan Data Statistik Kabupaten Mamuju tahun 2024 Realisasi Penduduk Miskin sebesar 7,15 persen dari target Daerah Kabupaten Mamuju sebesar 5 persen atau Capaian Kinerja sebesar 69,93 persen. bila dibandingkan pada tahun sebelumnya atau lebih tepatnya pada tahun 2023 persentase Penduduk Miskin sebesar 7,57 persen. Dari jumlah angka persentase tersebut dapat kita lihat bahwa penduduk miskin di kabupaten Mamuju telah berhasil ditekan dari tahun sebelumnya dengan mengalami penurunan dengan realisasipada tahun 2024 sebesar 7,15 persen sehingga mengalami penurunan sekitar 0,42 persen.

Analisisnya disebutkan bahwa Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan hal ini disebabkan masih tingginya tingkat pengeluaran pada kebutuhan masyarakat.Pada tahun 2024, garis kemiskinan sebesar Rp.356.903 per kapita per bulan. dampaknya, jumlah penduduk miskin atau yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 22,64 ribu orang atau 7,15 persen dari seluruh penduduk. maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan mamuju mengalami penurunan angka garis kemiskinan namun hal tersebut masih dianggap belum memuaskan dari target RPJMD sebesar 5 persen.

Sedangkan untuk Indikator kedua pada sasaran strategis 9 yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebutkan ditahun 2024 Realisasi TPT sebesar 2,77 persen dari target

Daerah Kabupaten Mamuju sebesar 2,27 persen atau Capaian Kinerja sebesar 81,95 persen. terurai bahwa Jumlah pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin untuk Laki-laki sebanyak 1,640 Orang dan untuk perempuan sebanyak 2,812 Orang Pengangguran Terbuka. Namun, dapat dilaporkan berdasarkan data diatas pemerintah kabupaten mamuju mampu menekan TPT dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 yakni sebesar 2,99 persen walaupun belum mencapai target RPJMD 2,27 persen.

Gambaran kondisi tersebut bahwa setengah penganggur adalah penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2024 adalah sebesar 8,00 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 8 orang yang termasuk setengah penganggur. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen poin. Sedangkan jika dibandingkan Agustus 2019 masih lebih tinggi sebesar 1,58 persen poin. Pada Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 8,28 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 7,57 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik tingkat setengah pengangguran laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,34 persen poin dan 1,30 persen poin.

Untuk diketahui bahwa Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

dapat disimpulkan bahwa menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan. Isu pengangguran sangat terkait dengan peluang kerja, kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Pengurangan pengangguran perlu menjadi prioritas pembangunan dengan mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan wilayah segitiga emas serta penopang ibukota Negara, Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu memanfaatkan potensi sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Dari identifikasi potensi dan kendala tersebut, Kabupaten Mamuju cukup mempunyai peluang dalam meningkatkan investasi dengan pertimbangan bahwa investasi mempunyai nilai strategis dalam mengungkit perekonomian daerah, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, Kabupaten Mamuju perlu distimulasi melalui penguatan bargaining position UMKM, sumber daya wirausahawan dan pengembangan Bumdes sebagai pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan yang memberi kontribusi terhadap kesenjangan pendapatan (gini ratio) antar wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Tabel III.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kemandirian desa

| Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | |
| 1 Indeks Desa Membangun | Skala | 0,660 (Berkembang) | 0,698 (Berkembang) | 0,667 (Berkembang) | 96 |
| Rata-rata capaian | | | | | 96 |

Disebutkan bahwa Capaian Kinerja pada sasaran Strategis 10 ini mendapatkan hasil sebesar 96 persen atau dengan kata lain berkembang dengan nilai skala 0,667 sedikit rendah dibawah dari yang ditargetkan dengan skala 0,698. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,660 dengan status skala ‘desa berkembang’ capaian tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,667 dengan status skala yang tetap yaitu dalam skala ‘desa berkembang’.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2024, Kabupaten Mamuju memiliki nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,667 dengan jumlah desa sebanyak 88 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, jumlah desa Berkembang sebanyak 42 desa (47,72 persen), jumlah desa maju sebanyak 25 desa (28,41 persen), dan jumlah desa tertinggal sebanyak 21 desa (23,86

persen). Sedangkan pada tahun 2023, nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Mamuju adalah 0,660 dengan jumlah desa yang sama sebanyak 88 desa.

Nilai Indeks Desa Membangun tersusun atas tiga yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Masing-masing nilai indeks memberikan kontribusi bobot yang sama dalam penentuan nilai IDM suatu desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai IDM diperlukan langkah kebijakan yang tepat yang diwujudkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan capaian masing-masing indeks. Dibawah ini tersaji rata-rata nilai IDM untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Mamuju

Analisa dalam upaya pembangunan desa di wilayah Kabupaten Mamuju adalah nilai IKL yang mengalami penurunan. Seperti dijelaskan sebelumnya, faktor penentu IKL adalah kualitas lingkungan, tingkat kerawanan bencana dan respon/tanggap bencana. Kualitas lingkungan dilihat dari tingkat pencemaran air, udara, tanah, dan limbah. Tingkat kerawanan bencana dilihat dari frekuensi bencana banjir, longsor dan kebakaran (kekeringan) yang terjadi dalam 1 tahun, sedangkan respon/ tanggap bencana berkaitan dengan ada tidaknya peringatan dini, jalur evakuasi dan mitigasi bencana. Penurunan nilai IKL di Kabupaten Mamuju diakibatkan karena tingkat kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup atau pun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah. Hal ini senada dengan ungkapan pendamping desa yang mengatakan bahwa “banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan, seperti masih banyak yang buang sampah ke sungai sehingga terjadi pencemaran air dan tersumbatnya aliran sungai yang mengakibatkan banjir pada musim hujan. Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah masalah pemberian ijin usaha oleh pemerintah kabupaten. Pemberian ijin usaha hendaknya mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan sehingga proses pembangunan bisa berkelanjutan. Nilai indeks ketahanan lingkungan juga ditentukan dari potensi kebencanaan yang mungkin terjadi di desa. Untuk itu diperlukan program kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana. Pemerintah Kabupaten termasuk pemerintah desa perlu menyediakan anggaran agar program desa siaga dapat terimplementasi secara baik.

Desentralisasi dan otonomi desa pada hakekatnya adalah memandirikan masyarakat dan desa yang ditujukan dengan terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan

sesuai dengan kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan. Efektifitas penggunaan dana desa yang diberikan pemerintah tentu harus bisa mengangkat derajat ketertinggalan desa di wilayah Kabupaten Mamuju yang dicirikan dengan meningkatnya nilai IDM di masing-masing desa. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Mamuju .

Status ketertinggalan desa adalah permasalahan yang harus ditangani secara sinergis baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten termasuk desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Pada pasal 112 dan 113 UU tersebut, peran pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa.

C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju terealisasi sebesar Rp1.205.063.220.760,43 atau 98,46 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.223.867.879.901,00. Hal ini bisa dikatakan sebuah pencapaian yang cukup baik, walaupun hanya mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen, setidaknya tren realisasi pendapatan ini masih dapat dipertahankan yaitu sebesar 98,37 persen pada tahun 2023. Rincian target, realisasi dan capaian pendapatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.17
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 97.503.880.661,00 | 91.256.590.772,43 | 93,59 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.107.363.999.240,00 | 1.097.102.110.527,00 | 99,07 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 19.000.000.000,00 | 16.704.519.461,00 | 87,92 |
| Jumlah | | 1.223.867.879.901,00 | 1.205.063.220.760,43 | 98,37 |

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 terdiri dari Pajak Daerah dengan sebesar Rp35.895.343.293,59 atau 100,81 persen, Retribusi Daerah sebesar Rp9.268.306.656,00 atau 63,28 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.270.328.840,00 atau 84,69 persen dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp41.822.611.982,84 atau 99,09 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.18
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Pajak Daerah | 35.607.705.306,00 | 35.895.343.293,59 | 100,81 |
| 2 | Retribusi Daerah | 14.645.744.856,00 | 9.268.306.656,00 | 63,28 |
| 3 | Hasil Pengelolaan | 5.042.087.993,00 | 4.270.328.840,00 | 84,69 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 42.208.342.506,00 | 41.822.611.982,84 | 99,09 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 97.503.880.661,00 | 91.526.558.186,43 | 93,87 |

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp35.895.343.293,59 atau 100,81 persen. Pajak daerah pada tahun 2024 ini jika dilihat dari pencapaian menunjukkan adanya peningkatan persentase dan nominal. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan tersebut, dengan hampir seluruh objek pajak menunjukkan peningkatan signifikan walaupun belum 100 persen optimal.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.19
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Pajak Hotel | 2.202.200.000,00 | 1.386.600.765,00 | 62,96 |
| 2 | Pajak Restoran | 2.500.000.000,00 | 2.715.512.251,00 | 108,62 |
| 3 | Pajak Hiburan | 1.127.194.226,00 | 1.181.883.577,00 | 104,85 |
| 4 | Pajak Reklame | 814.550.000,00 | 979.870.000,00 | 120,30 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 16.364.539.784,00 | 16.669.177.491,00 | 101,86 |
| 6 | Pajak Parkir | 306.259.060,00 | 219.357.424,00 | 71,62 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 7 | Pajak Air Tanah | 100.000.000,00 | 2.320.423,00 | 2,32 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 976.240.447,00 | 2.880.000,00 | 0,30 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.305.798.785,00 | 4.354.758.442,00 | 188,86 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 3.339.431.404,00 | 2.698.785.817,84 | 80,82 |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 5.571.491.600,00 | 5.684.197.102,75 | 102,02 |
| Jumlah | | 35.607.705.306,00 | 35.895.343.293,59 | 100,81 |

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp9.268.306.656,00 atau 63,28 persen dari target Rp14.645.744.856,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Peningkatan realisasi retribusi ini disebabkan karena retribusi perlahan optimal pada setiap objeknya. Selain itu, dilakukan penyesuaian target yang dianggap dapat diterima secara realistis.

Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.20
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju 2024

| No | Uraian | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Retribusi Jasa Umum | | | | |
| | a. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 5.600.000.000,00 | 6.724.226.100,00 | 120,08 |
| | b. | Retribusi Pelayanan Persampahan | 3.024.300.000,00 | 1.268.720.000,00 | 41,95 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | c. | Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan | 1.494.250.000,00 | 182.500.000,00 | 12,21 |
| | d. | Retribusi Pelayanan Pasar | 650.000.000,00 | 435.481.000,00 | 67,00 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | | | | |
| | a. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 109.650.000,00 | 52.070.000,00 | 47,49 |
| | b. | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 200.000.000,00 | 0 | 0 |
| | c. | Retribusi Rumah Potong Hewan | 104.800.000,00 | 21.560.000,00 | 20,57 |
| | d. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 0,00 | 110.100.000,00 | 0,00 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | | | | |
| | a. | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 3.462.744.856,00 | 473.649.556,00 | 13,68 |
| Jumlah Retribusi Daerah | | | 14.645.744.856,00 | 9.268.306.656,00 | 63,28 |

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp4.270.328.840,00 atau 84,69 persen. Pendapatan ini merupakan deviden atau bagian laba yang diterima dari penyertaan modal kepada Bank Sulselbar.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 sebesar Rp41.822.611.982,84 atau 99,09 persen dari target. Realisasi Lain-lain PAD ini harus

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tetapi jika dilihat dari persentase bisa dikatakan capaian yang baik. Penyebab penurunan realisasi ini selain disebabkan karena Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selama ini menjadi target Lain-lain PAD, pada tahun 2024 menjadi target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah . Rincian Lain-lain PAD yang sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.21
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan | 1.716.149.169,00 | 208.863.500,00 | 12,17 |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 726.750.000,00 | 1.741.000.000,00 | 239,56 |
| 3 | Jasa Giro | 5.865.026.490,00 | 2.806.481.805,00 | 47,85 |
| 4 | Pendapatan Bunga | 0 | 23.560.577,00 | - |
| 5 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0 | 132.857.966,00 | - |
| 6 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 500.416.847,00 | 751.315.080,24 | 150,14 |
| 7 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 400.000.000,00 | 0 | 0 |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 1.700.300.098,60 | 127,84 |
| 9 | Pendapatan BLUD | 33.000.000.000,00 | 34.458.232.956,00 | 104,42 |
| Jumlah | | 42.208.342.506,00 | 41.822.611.982,84 | 99,09 |

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2024

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp1.097.102.110.527,00 atau 99,07 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.22
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | | | | |
| | a. | Bagi Hasil Pajak | | | |
| | | 1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 1.652.809.000,00 | 2.058.781.000,00 | 124,56 |
| | | 2 DBH PPh Pasal 21 | 5.915.414.000,00 | 7.256.952.000,00 | 122,68 |
| | | 3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 87.926.000,00 | 90.138.000,00 | 102,52 |
| | | Jumlah Bagi Hasil Pajak | 7.656.149.000,00 | 9.405.871.000,00 | 122,85 |
| | b. | Bagi Hasil Bukan Pajak | | | |
| | | 1 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 11.218.000,00 | 332.067.000,00 | 2.960,13 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|--------|
| | | 2 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 0 | 9.831.000,00 | - |
| | | 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 166.354.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 3.661.811.000,00 | 3.661.811.000,00 | 100,00 |
| | | 5 | DBH Sawit | 4.563.360.000,00 | 4.563.360.000,00 | 100,00 |
| Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak | | | | 8.402.743.000,00 | 8.567.069.000,00 | 101,96 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | | | 647.270.520.000,00 | 657.413.682.000,00 | 101,57 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus | | | 302.651.939.000,00 | 279.544.758.680,00 | 92,37 |
| 4 | Dana Desa | | | 86.323.445.000,00 | 86.323.445.000,00 | 100,00 |
| 5 | Insentif Fiskal | | | 6.951.678.000,00 | 6.951.678.000,00 | 100,00 |
| 6 | Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi | | | 48.107.525.240,00 | 48.895.606.847,00 | 101,64 |
| Jumlah Pendapatan Transfer | | | | 1.107.363.999.240,00 | 1.097.102.110.527,00 | 99,07 |

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2024 sebesar Rp16.704.519.461,00 atau 87,92 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan ini berupa Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seluruhnya diperuntukkan untuk belanja Operasional seluruh Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Sementara itu, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju yang selama ini menjadi target Pendapatan ini, pada tahun 2024 dipindahkan menjadi target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sehingga terlihat adanya penurunan realisasi.

a. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp1.251.196.419.550,00 atau tercapai 95,59 persen. Secara ringkas, Belanja dan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III.23
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

| Uraian | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Belanja Operasi | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai | 507.217.608.348,00 | 499.773.175.745,00 | 98,53 |
| 2 | Belanja Barang Jasa | 352.458.254.362,00 | 334.968.712.389,00 | 95,04 |
| 3 | Belanja Hibah | 56.786.607.666,00 | 55.546.320.724,00 | 97,82 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 600.000.000,00 | 570.000.000,00 | 95,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | | 917.062.470.376,00 | 890.558.172.650,00 | 97,11 |
| Belanja Modal | | | | |
| 1 | Belanja Modal Tanah | 386.405.000,00 | 22.065.760,00 | 5,71 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan Mesin | 43.453.127.953,00 | 39.344.374.182,00 | 90,54 |
| 3 | Belanja Modal Gedung Bangunan | 112.104.938.683,00 | 88.727.406.636,00 | 79,15 |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan | 76.745.799.180,00 | 74.435.307.687,00 | 96,99 |
| 5 | Belanja Modal | 1.429.375.000,00 | 1.429.190.000,00 | 99,99 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Aset Tetap Lainnya | | | |
| 6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| Jumlah Belanja Modal | | 234.129.645.816,00 | 203.968.344.265,00 | 87,12 |
| Belanja Tak Terduga | | | | |
| 1 | Belanja Tak Terduga | 500.000.000,00 | 175.006.800,00 | 35,00 |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | | 500.000.000,00 | 175.006.800,00 | 35,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | Bagi Hasil | 5.015.345.017,00 | 4.294.845.635,00 | 85,63 |
| 2 | Bantuan Keuangan | 152.248.533.138,00 | 152.200.050.200,00 | 99,97 |
| Jumlah Transfer Bantuan Keuangan | | 157.263.878.155,00 | 156.494.895.835,00 | 98,75 |
| Jumlah Belanja dan Transfer Daerah | | 1.308.955.994.347,00 | 1.251.196.419.550,00 | 95,59 |

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Serapan realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2024 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 95,59 persen dari 93,37 persen. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja dan transfer yang memang meningkat dari tahun sebelumnya dan diikuti dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju yang mampu memaksimalkan belanja untuk kebutuhan operasional dan investasi daerah.

Jika memperhatikan setiap Jenis belanja, serapan realisasi bisa dikatakan cukup maksimal yang berada diatas angka 75 persen, kecuali beberapa jenis belanja tertentu yang masih rendah disebabkan karena berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya.

Adapun jenis belanja yang dianggap rendah realisasinya yaitu:

- Belanja Modal Tanah hanya sebesar 5,71 persen yang sebagian besar untuk pensertifikatan tanah milik pemda belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala dalam proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut.
- Belanja Tak Terduga yang dianggarkan namun diharapkan untuk tidak digunakan hanya terealisasi sebesar 35,00 persen.

b. Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp85.088.114.446,04 bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan Silpa tahun sebelumnya Rp85.088.114.446,04 sementara pada tahun 2024 tidak ada penganggaran untuk pengeluaran pembiayaan. Dan dari hasil tersebut, setelah memperhitungkan surplus dari pendapatan terhadap belanja, terdapat Sisa Lebih Penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp38.954.915.656,47 yang akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.24
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

| No | Uraian | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|--|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| | a. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 85.088.114.446,00 | 85.088.114.446,04 | 100 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | 85.088.114.446,00 | 85.088.114.446,04 | 100 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| | a. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Jumlah Pembiayaan Daerah Neto | | | 85.088.114.446,00 | 85.088.114.446,04 | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) | | | 0,00 | 38.954.915.656,47 | |

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamuju selama tahun 2024, media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan Keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat Langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran kinerja daerah tahun 2023, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun berjalan. Di samping dikemukakan Gambaran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik Sekali, 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,98 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen, dikategorikan Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 bermakna Baik, menurun sebesar 7,65 persen capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun rekomendasi Langkah-langkah perbaikan kinerja pemerintah kabupaten mamuju kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan rencana aksi sapip Pemkab Mamuju di seluruh unsur baik pada perencanaan kinerja – pengukuran kinerja – pelaporan kinerja – evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan pemerintah daerah agar mendapatkan poin-poin perbaikan sesuai yang diharapkan
3. Mengembangkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) agar penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan kepada Masyarakat dapat terwujud di pemerintah kabupaten mamuju.

Demikian rekomendasi perbaikan kinerja kabupaten mamuju untuk peningkatan kinerja kedepannya.



PEMERINTAH KABUPATENMAMUJU INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Ahmad Kirang No 39. Mamuju (Kode Pos) 91511 Sulawesi Barat
E-mail : inspektoratkabmamuju@gmail.com. Web : inspektoratkabmamuju.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas pada laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini walaupun masih diperlukan adanya perbaikan untuk meningkatkan keandalannya.

Mamuju, 26 Maret 2025

Inspektur Daerah,



MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE, CGRE, QGIA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19710915 199903 1 007

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU

| SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | |
| Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | B | B | 100 |
| | Indeks Pengelolaan keuangan Daerah | Peringkat / Nilai | Baik/A | Perlu Prbaikan/B | 75 |
| | Nilai LPPD | Skor | Sangat Tinggi | Sedang | 50 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor | 90 | 76,74 | 85,26 |
| Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah | Indeks Pembangunan Infrastruktur | Persen | 70 | 78 | 111,43 |
| | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Persen | 70 | 82 | 117,14 |
| Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 80 | 74,66 | 93,23 |
| | Indeks Resiko Bencana | Predikat | Sedang | Sedang | 100 |
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | Indeks Pembangunan Manusia | Persen | 68,70 | 71,86 | 104,59 |
| | Indeks Pendidikan | Skala | 0,42 | 0,64 | 152,38 |
| | Indeks Kesehatan | Skala | 0,578 | 0,802 | 138,75 |
| | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) | Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun | 32.500 | 10.440 | 32,12 |
| | Indeks Pemberdayaan Gender | Persen | 59,87 | 60,96 | 101,82 |
| | Indeks Kesejahteraan Sosial | Persen | 65 | 77 | 122 |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Indeks ketentraman dan ketertiban | Persen | 100 | 99,65 | 99,65 |
| | Indeks Kriminilitas | Persen | 100 | 99,65 | 99,65 |
| Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah | Indeks Gini | Persen | 0,25 | 0,425 | 58,82 |
| | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 5.6-5.7% | 6,47 | 113,50 |
| Meningkatnya investasi daerah | Pertumbuhan Investasi | Persen | 15 | 45,04 | 300,26 |
| Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 5 | 7,15 | 69,93 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 2,27 | 2,77 | 81,95 |
| Meningkatnya kemandirian desa | Indeks Desa Membangun | Skala | 0,698 (Berkembang) | 0,667 (Berkembang) | 96 |

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

Jabatan : BUPATI MAMUJU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju, Maret 2025


BUPATI MAMUJU,

HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU

| SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|---|--|---------------------------|--------------------|
| Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | B |
| | Indeks Pengelolaan keuangan Daerah | Peringkat | Baik |
| | Nilai LPPD | Skor | Sangat Tinggi |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor | 90 |
| Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah | Indeks Pembangunan Infrastruktur | Persen | 70 |
| | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Persen | 70 |
| Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 80 |
| | Indeks Resiko Bencana | Predikat | Sedang |
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | Indeks Pembangunan Manusia | Persen | 68,70 |
| | Indeks Pendidikan | Skala | 0,42 |
| | Indeks Kesehatan | Skala | 0,578 |
| | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) | Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun | 32.500 |
| | Indeks Pemberdayaan Gender | Persen | 59,87 |
| | Indeks Kesejahteraan Sosial | Persen | 65 |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Indeks ketentraman dan ketertiban | Persen | 100 |
| | Indeks Kriminilitas | Persen | 100 |
| Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah | Indeks Gini | Persen | 0,25 |
| | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 5.6 - 5.7% |
| Meningkatnya investasi daerah | Pertumbuhan Investasi | Persen | 15 |
| Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 5 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 2,27 |
| Meningkatnya kemandirian desa | Indeks Desa Membangun | Skala | 0,698 (Berkembang) |


BUPATI MAMUJU,

H. SITI SUTINAH SUHARDI



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | REF | ANGGARAN TA 2024 | REALISASI TA 2024 | (%) | REALISASI TA 2023 |
|----|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5.1.1.a. | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.a.1) | 35,607,705,306.00 | 35,895,343,293.59 | 100.81 | 30,365,234,539.14 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.a.2) | 14,645,744,856.00 | 9,538,274,070.00 | 65.13 | 8,824,184,725.05 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.a.3) | 5,042,087,993.00 | 4,270,328,840.00 | 84.69 | 4,233,776,476.00 |
| 6 | Lain-lain PAD Yang Sah | 5.1.1.a.4) | 42,208,342,506.00 | 41,822,611,982.84 | 99.09 | 58,183,570,853.71 |
| 7 | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (3 s/d 6) | | 97,503,880,661.00 | 91,526,558,186.43 | 93.87 | 101,606,766,593.90 |
| 8 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.b | | | | |
| 9 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 5.1.1.b.1) | | | | |
| 10 | Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.b.1)a) | 7,656,149,000.00 | 9,405,871,000.00 | 122.85 | 10,318,140,430.00 |
| 11 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 5.1.1.b.1)b) | 8,402,743,000.00 | 8,567,069,000.00 | 101.96 | 9,737,619,475.00 |
| 12 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 5.1.1.b.1)c) | 647,270,520,000.00 | 657,413,682,000.00 | 101.57 | 621,340,591,953.00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 5.1.1.b.1)d) | 302,651,939,000.00 | 279,544,758,680.00 | 92.37 | 256,545,824,857.00 |
| 14 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 13) | | 965,981,351,000.00 | 954,931,380,680.00 | 98.86 | 897,942,176,715.00 |
| 15 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 5.1.1.b.2) | | | | |
| 16 | Dana Insentif Daerah (DID) | | - | - | #DIV/0! | 10,176,284,000.00 |
| 17 | Dana Desa | | 86,323,445,000.00 | 86,323,445,000.00 | 100.00 | 85,572,902,000.00 |
| 18 | Insentif Fiskal | | 6,951,678,000.00 | 6,951,678,000.00 | 100.00 | - |
| 19 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 17) | | 93,275,123,000.00 | 93,275,123,000.00 | 100.00 | 95,749,186,000.00 |
| 20 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 5.1.1.b.3) | | | | |
| 21 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.b.3)a) | 48,107,525,240.00 | 48,895,606,847.00 | 101.64 | 46,628,150,786.00 |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (20) | | 48,107,525,240.00 | 48,895,606,847.00 | 101.64 | 46,628,150,786.00 |
| 23 | Bantuan Keuangan | 5.1.1.b.4) | | | | |
| 24 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | 5.1.1.b.4)a) | - | - | #DIV/0! | 6,420,000,000.00 |
| 25 | Jumlah Bantuan Keuangan (23) | | - | - | #DIV/0! | 6,420,000,000.00 |
| 26 | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 +21 + 24) | | 1,107,363,999,240.00 | 1,097,102,110,527.00 | 99.07 | 1,046,739,513,501.00 |
| 27 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.1.1.c | | | | |
| 28 | Pendapatan Hibah | 5.1.1.c.1) | - | - | #DIV/0! | 48,642,558,839.00 |
| 29 | Pendapatan Lainnya | 5.1.1.c.2) | 19,000,000,000.00 | 16,704,519,461.00 | 87.92 | - |
| 30 | Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (27 s/d 28) | | 19,000,000,000.00 | 16,704,519,461.00 | 87.92 | 48,642,558,839.00 |
| 31 | TOTAL PENDAPATAN (7 + 25 +29) | | 1,223,867,879,901.00 | 1,205,333,188,174.43 | 98.49 | 1,196,988,838,933.90 |
| 32 | BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| 33 | BELANJA OPERASI | 5.1.2.a | | | | |
| 34 | Belanja Pegawai | 5.1.2.a.1) | 507,217,608,348.00 | 499,773,175,745.00 | 98.53 | 424,150,602,261.00 |
| 35 | Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.a.2) | 352,458,254,362.00 | 334,963,712,389.00 | 95.04 | 321,947,512,168.00 |
| 36 | Belanja Hibah | 5.1.2.a.3) | 56,786,607,666.00 | 55,545,798,724.00 | 97.81 | 22,090,349,472.00 |
| 37 | Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.a.4) | 600,000,000.00 | 570,000,000.00 | 95.00 | - |
| 38 | JUMLAH BELANJA OPERASI (33 s/d 36) | | 917,062,470,376.00 | 890,852,686,858.00 | 97.14 | 768,188,463,901.00 |
| 39 | BELANJA MODAL | 5.1.2.b | | | | |
| 40 | Belanja Modal Tanah | 5.1.2.b.1) | 386,405,000.00 | 22,065,760.00 | 5.71 | 108,925,000.00 |
| 41 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.1.2.b.2) | 43,453,127,953.00 | 39,344,374,182.00 | 90.54 | 60,370,283,235.00 |
| 42 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.1.2.b.3) | 112,104,938,683.00 | 88,727,406,636.00 | 79.15 | 111,326,417,318.00 |
| 43 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.b.4) | 76,745,799,180.00 | 74,435,307,687.00 | 96.99 | 66,168,909,423.00 |
| 44 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.b.5) | 1,429,375,000.00 | 1,429,190,000.00 | 99.99 | 5,569,398,050.00 |
| 45 | Belanja Modal Aset Lainnya | 5.1.2.b.6) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 147,180,908.00 |
| 46 | JUMLAH BELANJA MODAL (38 s/d 43) | | 234,129,645,816.00 | 203,968,344,265.00 | 87.12 | 243,691,113,934.00 |
| 47 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | | |
| 48 | Belanja Tak Terduga | 5.1.2.c | 500,000,000.00 | 175,006,800.00 | 35.00 | 41,258,973.00 |
| 49 | JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (46) | | 500,000,000.00 | 175,006,800.00 | 35.00 | 41,258,973.00 |
| 50 | TOTAL BELANJA (36 + 44 +47) | | 1,151,692,116,192.00 | 1,094,996,037,923.00 | 95.08 | 1,011,920,836,808.00 |
| 51 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 5.1.2.d | | | | |
| 52 | Belanja Bagi Hasil | 5.1.2.d.1) | 5,015,345,017.00 | 4,294,845,635.00 | 85.63 | 3,959,920,458.00 |
| 53 | Belanja Bantuan Keuangan | 5.1.2.d.2) | 152,248,533,138.00 | 152,200,050,200.00 | 99.97 | 148,685,153,601.00 |
| 54 | JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (50 s/d 51) | | 157,263,878,155.00 | 156,494,895,835.00 | 99.51 | 152,645,074,059.00 |
| 55 | TOTAL TRANSFER (52) | | 157,263,878,155.00 | 156,494,895,835.00 | 99.51 | 152,645,074,059.00 |
| 56 | TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (48 + 53) | | 1,308,955,994,347.00 | 1,251,490,933,758.00 | 95.61 | 1,164,565,910,867.00 |
| 57 | SURPLUS / (DEFISIT) (30 -54) | 5.1.3 | - 85,088,114,446.00 | - 46,157,745,583.57 | 54.25 | 32,422,928,066.90 |
| 58 | PEMBIAYAAN | | | | | |
| 59 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.4 | | | | |
| 60 | Penggunaan SiLPA | 5.1.4.a | 85,088,114,446.00 | 85,088,114,446.00 | 100.00 | 56,665,186,379.14 |
| 61 | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (58) | | 85,088,114,446.00 | 85,088,114,446.00 | 100.00 | 56,665,186,379.14 |
| 62 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.5 | | | | |
| 63 | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (61) | | - | - | 0.00 | 4,000,000,000.00 |
| 65 | PEMBIAYAAN NETTO (59 - 61) | 5.1.6 | 85,088,114,446.00 | 85,088,114,446.00 | 100.00 | 52,665,186,379.14 |
| 66 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (55 + 62) | 5.1.7 | - | 38,930,368,862.47 | | 85,088,114,446.04 |

Mamuju, 2025

Bupati Mamuju,

Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si

" Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini "

Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|----------|-------------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | C | CC | 210.093.5 24.365 | B | 215.347.0 03.322 | B | 220.712.5 06.253 | BB | 226.207.9 92.375 | A | 234.126.5 03.778 | A | 1.106.487. 530.093 | |
| Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan | Indeks Pengelolaan keuangan Daerah | Predikat | Baik | Baik | 161.213.7 30.314 | Baik | 165.244.0 73.574 | Baik | 169.375.1 75.410 | Baik | 173.609.5 54.795 | Baik | 177.949.7 93.669 | Baik | 847.392.3 27.762 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan | Persen | 100 | 100 | 31.761.44 0.701 | 100 | 32.555.47 6.719 | 100 | 33.369.36 3.636 | 100 | 34.203.59 7.727 | 100 | 35.058.68 7.671 | 100 | 166.948.5 66.454 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum | Persen | 100 | 100 | 31.761.44 0.701 | 100 | 32.555.47 6.719 | 100 | 33.369.36 3.636 | 100 | 34.203.59 7.727 | 100 | 35.058.68 7.671 | 100 | 166.948.5 66.454 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan | Persen | 100 | 100 | 31.761.44 0.701 | 100 | 32.555.47 6.719 | 100 | 33.369.36 3.636 | 100 | 34.203.59 7.727 | 100 | 35.058.68 7.671 | 100 | 166.948.5 66.454 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan | Persen | 100 | 100 | 31.761.44 0.701 | 100 | 32.555.47 6.719 | 100 | 33.369.36 3.636 | 100 | 34.203.59 7.727 | 100 | 35.058.68 7.671 | 100 | 166.948.5 66.454 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan | Persen | 100 | 100 | 31.761.44 0.701 | 100 | 32.555.47 6.719 | 100 | 33.369.36 3.636 | 100 | 34.203.59 7.727 | 100 | 35.058.68 7.671 | 100 | 166.948.5 66.454 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |

| | Outome) | | RPJMD | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Jawab |
|--|---|--------|----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Peningkatan Tertib Admnistrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah | Persen | 85 | 85 | 1.189.496.389 | 85 | 1.219.233.799 | 85 | 1.249.714.644 | 85 | 1.280.957.510 | 85 | 1.312.981.448 | 85 | 6.252.383.790 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase PAD terhadap Pendapatan | Persen | 7.04 | 7.04 | 608.515.210 | 7.04 | 623.728.090 | 7.04 | 639.321.293 | 7.04 | 655.304.325 | 7.04 | 671.686.933 | 7.04 | 3.198.555.851 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd | Persen | (0.87) | (0.87) | 608.515.210 | (0.87) | 623.728.090 | (0.87) | 639.321.293 | (0.87) | 655.304.325 | (0.87) | 671.686.933 | (0.87) | 3.198.555.851 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | Nilai LPPD | Skor | Tinggi | Sangat Tinggi | 34.666.090.159 | Sangat Tinggi | 35.533.883.257 | Sangat Tinggi | 36.403.380.067 | Sangat Tinggi | 37.291.833.112 | Sangat Tinggi | 38.275.794.622 | Sangat Tinggi | 182.170.981.217 | |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 633.162.495 | 100 | 661.353.263 | 100 | 670.367.647 | 100 | 676.937.250 | 100 | 757.080.363 | 100 | 3.398.901.018 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai | Persen | 100 | 100 | 259.777.250 | 100 | 262.323.067 | 100 | 264.893.833 | 100 | 267.489.793 | 100 | 270.111.193 | 100 | 1.324.595.136 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai | Persen | 100 | 100 | 233.364.200 | 100 | 235.651.169 | 100 | 237.960.551 | 100 | 240.292.564 | 100 | 242.647.431 | 100 | 1.189.915.915 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai | Persen | 100 | 100 | 245.073.104 | 100 | 247.474.820 | 100 | 249.900.074 | 100 | 252.349.094 | 100 | 254.822.115 | 100 | 1.249.619.207 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|--|--|----------|----------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|--|
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | Rasio | 8.15 | 9 | 32.000.000 | 9.95 | 32.800.000 | 10 | 33.620.000 | 10 | 34.460.500 | 10 | 35.322.013 | 10 | 168.202.513 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara | Rasio | N/A | 50 | 50.000.000 | 70 | 51.250.000 | 80 | 52.531.250 | 90 | 53.844.531 | 100 | 55.190.645 | 100 | 262.816.426 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis | Persen | 70 | 70 | 37.327.000 | 80 | 38.260.175 | 90 | 39.216.679 | 90 | 40.197.096 | 100 | 41.202.024 | 100 | 196.202.974 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD | Predikat | Memuaskan | Memuaskan | 27.472.886.110 | Memuaskan | 28.159.708.263 | Memuaskan | 28.863.700.969 | Memuaskan | 29.585.293.494 | Memuaskan | 30.324.925.831 | Memuaskan | 144.406.514.667 | SEKRETARIAT DPRD |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan | Persen | 80 | 83 | 402.500.000 | 85 | 412.562.500 | 90 | 422.876.563 | 95 | 433.448.477 | 100 | 444.284.688 | 100 | 2.115.672.228 | INSPEKTORAT DAERAH |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Presentase Audit dengan Tujuan tertentu | Persen | 100 | 100 | 402.500.000 | 100 | 412.562.500 | 100 | 422.876.563 | 100 | 433.448.477 | 100 | 444.284.688 | 100 | 2.115.672.228 | INSPEKTORAT DAERAH |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Presentase Obyek Pengawasan yang diawasi | Persen | 100 | 100 | 345.000.000 | 100 | 353.625.000 | 100 | 362.465.625 | 100 | 371.527.266 | 100 | 380.815.447 | 100 | 1.813.433.338 | INSPEKTORAT DAERAH |

| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKS | Persen | 100 | 100 | 400.000.000 | 100 | 410.000.000 | 100 | 420.250.000 | 100 | 430.756.250 | 100 | 441.525.156 | 100 | 2.102.531.406 | INSPEKTORAT DAERAH |
|---|--|--------|----------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN | Persen | 35.6 | 2.0 | 1.622.500.000 | 2.1 | 1.663.062.500 | 1.9 | 1.704.639.063 | 2.3 | 1.747.255.039 | 2.0 | 1.790.936.415 | 2.0 | 8.528.393.017 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya | Persen | 6.2 | 11.0 | 2.530.000.000 | 11.0 | 2.593.250.000 | 11.0 | 2.658.081.250 | 11.0 | 2.724.533.281 | 11.0 | 2.792.646.613 | 11.0 | 13.298.511.144 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Skor | 80 | 90 | 14.213.703.892 | 90 | 14.569.046.491 | 90 | 14.933.950.776 | 90 | 15.306.604.468 | 90 | 17.900.915.487 | 90 | 76.924.221.114 | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi | Persen | 100 | 100 | 150.000.000 | 100 | 153.750.000 | 100 | 157.593.750 | 100 | 161.533.594 | 100 | 200.000.000 | 100 | 822.877.344 | SEKRETARIAT DAERAH |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | Persen | 100 | 100 | 5.025.113.000 | 100 | 5.150.740.825 | 100 | 5.279.509.346 | 100 | 5.411.497.079 | 100 | 7.357.267.943 | 100 | 28.224.128.193 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana | Persen | 100 | 100 | 522.894.882 | 100 | 535.967.254 | 100 | 549.366.435 | 100 | 563.100.596 | 100 | 765.570.397 | 100 | 2.936.899.564 | SEKRETARIAT DAERAH |

| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana | Persen | 100 | 100 | 495.000.0 00 | 100 | 507.375.0 00 | 100 | 520.059.3 75 | 100 | 533.060.8 59 | 100 | 724.729.5 00 | 100 | 2.780.224. 734 | SEKRETARIAT DAERAH |
|---|--|--------|-------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--|-------------------|--|
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana | Persen | 100 | 100 | 314.543.9 98 | 100 | 322.407.5 98 | 100 | 330.467.7 88 | 100 | 338.729.4 83 | 100 | 347.197.7 20 | 100 | 1.653.346. 587 | SEKRETARIAT DAERAH |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana | Persen | 100 | 100 | 158.272.9 50 | 100 | 162.229.7 74 | 100 | 166.285.5 18 | 100 | 170.442.6 56 | 100 | 174.703.7 22 | 100 | 831.934.6 20 | SEKRETARIAT DAERAH |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana | Persen | 100 | 100 | 814.225.9 98 | 100 | 834.581.6 48 | 100 | 855.446.1 89 | 100 | 876.832.3 44 | 100 | 898.753.1 52 | 100 | 4.279.839. 331 | SEKRETARIAT DAERAH |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana | Persen | 100 | 100 | 193.686.9 00 | 100 | 198.529.0 73 | 100 | 203.492.2 99 | 100 | 208.579.6 07 | 100 | 213.794.0 97 | 100 | 1.018.081. 976 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas | Persen | 91 | 100 | 683.038.5 00 | 100 | 700.114.4 63 | 100 | 717.617.3 24 | 100 | 735.557.7 57 | 100 | 753.946.7 01 | 100 | 3.590.274. 745 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi | Persen | 100 | 100 | 683.038.500 | 100 | 700.114.463 | 100 | 717.617.324 | 100 | 735.557.757 | 100 | 753.946.701 | 100 | 3.590.274.745 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|--|
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE | Persen | 31 | 67 | 2.983.797.600 | 78 | 3.058.392.540 | 89 | 3.134.852.354 | 100 | 3.213.223.662 | 100 | 3.293.554.254 | 100 | 15.683.820.410 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral | Persen | N/A | 50 | 500.000.000 | 75 | 512.500.000 | 100 | 525.312.500 | 100 | 538.445.313 | 100 | 551.906.445 | 100 | 2.628.164.258 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi | Persen | N/A | 31 | 184.501.115 | 44 | 189.113.643 | 56 | 193.841.484 | 67 | 198.687.521 | 89 | 203.654.709 | 89 | 969.798.472 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | 100 | 100 | 715.000.000 | 100 | 732.875.000 | 100 | 751.875.000 | 100 | 769.976.797 | 100 | 789.226.217 | 100 | 3.758.953.014 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | Persen | 100 | 100 | 443.000.000 | 100 | 454.075.000 | 100 | 465.426.875 | 100 | 477.062.547 | 100 | 488.989.111 | 100 | 2.328.553.533 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan | Persen | 100 | 100 | 313.056.522 | 100 | 320.882.935 | 100 | 328.905.008 | 100 | 337.127.634 | 100 | 345.555.824 | 100 | 1.645.527.923 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--|---------------------|---|
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan | Persen | 100 | 100 | 34.533.92 7 | 100 | 35.397.27 5 | 100 | 36.282.20 7 | 100 | 37.189.26 2 | 100 | 38.118.99 4 | 100 | 181.521.6 65 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL |
| Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Indeks Pembangunan Infrastruktur | Persen | N/A | 50 | 167.359.4 11.907 | 60 | 171.573.3 97.206 | 70 | 176.237.7 32.134 | 80 | 180.643.6 75.442 | 90 | 185.159.7 67.328 | 90 | 880.973.9 84.017 | |
| Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Persen | N/A | 50 | 149.552.0 17.546 | 60 | 153.320.8 17.986 | 70 | 157.528.8 38.434 | 80 | 161.467.0 59.397 | 90 | 165.503.7 35.883 | 90 | 787.372.4 69.246 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | persen | N/A | 60 | 5.014.906. 655 | 63 | 5.140.279. 321 | 66 | 5.268.786. 304 | 69 | 5.400.505. 962 | 73 | 5.535.518. 611 | 73 | 26.359.99 6.853 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi | persen | N/A | 60 | 5.014.906. 655 | 63 | 5.140.279. 321 | 66 | 5.268.786. 304 | 69 | 5.400.505. 962 | 73 | 5.535.518. 611 | 73 | 26.359.99 6.853 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | persen | 73.1 | 82.1 | 7.786.707. 311 | 86.6 | 7.981.374. 994 | 91.1 | 8.180.909. 369 | 95.6 | 8.385.432. 103 | 100 | 8.595.067. 906 | 100 | 40.929.49 1.683 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | persen | N/A | N/A | 0 | 30 | 1.000.000.000 | 35 | 1.090.000.000 | 40 | 1.180.000.000 | 45 | 1.280.000.000 | 45 | 4.550.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|--|---|--------|----------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga yangmemperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | persen | 60 | 70 | 2.629.974.900 | 75 | 2.695.724.273 | 80 | 2.763.117.379 | 85 | 2.832.195.314 | 90 | 2.903.000.197 | 90 | 13.824.012.063 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase dalam kondisi baik | persen | 21.49 | 27.49 | 1.328.925.100 | 30.49 | 1.362.148.228 | 33.49 | 1.396.201.933 | 36.49 | 1.431.106.982 | 39.49 | 1.466.884.656 | 39.49 | 6.985.266.899 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase infrastruktur jalan permukiman kondisi baik | persen | 30 | 44 | 6.643.155.225 | 50 | 6.809.234.106 | 56 | 6.979.464.958 | 62 | 7.153.951.582 | 68 | 7.332.800.372 | 68 | 34.918.606.243 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota | persen | 24.30 | 26.10 | 18.789.537.550 | 27.10 | 19.259.275.989 | 28.10 | 19.740.757.889 | 19.10 | 20.234.276.836 | 30.10 | 20.740.133.757 | 30.10 | 98.763.982.021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan | persen | 10.30 | 39.90 | 240.300.000 | 53.90 | 246.307.500 | 68.80 | 252.465.188 | 83.70 | 258.776.817 | 98.60 | 265.246.238 | 98.60 | 1.263.095.743 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) | persen | 48.72 | 54.72 | 80.000.00 0.000 | 57.72 | 81.000.00 0.000 | 60.72 | 82.960.00 0.000 | 63.72 | 84.971.25 0.000 | 66.72 | 87.025.03 1.250 | 66.72 | 415.956.2 81.250 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|---|--|--------|-------------------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|---------------------|--|
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | persen | 10 | 20 | 191.604.1 50 | 25 | 196.394.2 54 | 30 | 201.304.1 10 | 35 | 206.336.7 13 | 40 | 211.495.1 31 | 40 | 1.007.134. 358 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang | persen | 9 | 9 | 900.000.0 00 | 18 | 922.500.0 00 | 27 | 1.320.562. 500 | 36 | 1.353.576. 563 | 45 | 1.387.415. 977 | 45 | 5.884.055. 040 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | persen | 100 | 100 | 11.400.00 0.000 | 100 | 11.685.00 0.000 | 100 | 11.977.12 5.000 | 100 | 12.276.55 3.125 | 100 | 12.583.46 6.953 | 100 | 59.922.14 5.078 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Luas Kawasan Permukiman Kumuh | Ha | 49.84 | 49.64 | 930.000.0 00 | 49.49 | 953.250.0 00 | 49.35 | 977.081.2 50 | 49.22 | 1.001.508. 281 | 49.10 | 1.026.545. 988 | 246.8 | 4.888.385. 519 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Luas Permukiman yang tertata | persen | 10.13 | 14.89 | 1.550.000.000 | 14.85 | 1.588.750.000 | 15.79 | 1.628.468.750 | 16.24 | 1.669.180.469 | 16.69 | 1.710.909.980 | 78.46 | 8.147.309.199 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|--|
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU | persen | 78 | 80 | 3.500.000.000 | 80 | 3.587.500.000 | 80 | 3.677.187.500 | 80 | 3.769.117.188 | 80 | 3.863.345.117 | 80 | 18.397.149.805 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi | persen | N/A | 30 | 10.000.000 | 40 | 10.250.000 | 45 | 10.506.250 | 50 | 10.768.906 | 55 | 11.038.129 | 55 | 52.563.285 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal | hektar | N/A | 45 | 22.000.000 | 50 | 22.550.000 | 55 | 23.113.750 | 60 | 23.691.594 | 65 | 24.283.884 | 65 | 115.639.228 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase penanganan sengketa tanah garapan | persen | N/A | 100 | 25.000.00 0 | 100 | 25.625.00 0 | 100 | 26.265.62 5 | 100 | 26.922.26 6 | 100 | 27.595.32 2 | 100 | 131.408.2 13 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|--|--|--------|-------------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|--------------------|--|
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | hektar | 85 | 86 | 3.250.000. 000 | 87 | 3.331.250. 000 | 88 | 3.414.531. 250 | 89 | 3.499.894. 531 | 90 | 3.587.391. 895 | 90 | 17.083.06 7.676 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Persen | N/A | 87 | 75.000.00 0 | 88 | 76.875.00 0 | 89 | 78.796.87 5 | 90 | 80.766.79 7 | 91 | 82.785.96 7 | 91 | 394.224.6 39 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Tersedianya tanah untuk masyarakat | persen | N/A | N/A | 0 | 100 | 30.000.00 0 | 100 | 30.750.00 0 | 100 | 31.518.75 0 | 100 | 32.306.71 9 | 100 | 124.575.4 69 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Persen | 100 | 100 | 250.000.000 | 100 | 256.250.000 | 100 | 262.656.250 | 100 | 269.222.656 | 100 | 275.953.223 | 100 | 1.314.082.129 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|--|---|--------|----------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|
| Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup | Persen | N/A | 80 | 13.897.394.361 | 80 | 14.244.829.220 | 80 | 14.600.949.950 | 80,5 | 14.965.973.701 | 80,6 | 15.340.123.043 | 80,6 | 73.049.270.275 | |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup | persen | 100 | 100 | 257.567.000 | 100 | 264.006.175 | 100 | 270.606.329 | 100 | 277.371.488 | 100 | 284.305.775 | 100 | 1.353.856.767 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang | persen | N/A | 50 | 205.000.000 | 55 | 210.125.000 | 60 | 215.378.125 | 65 | 220.762.578 | 70 | 226.281.643 | 70 | 1.077.547.346 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai | persen | 0.01 | 0.01 | 4.860.000.000 | 0.01 | 4.981.500.000 | 0.01 | 5.106.037.500 | 0.01 | 5.233.688.438 | 0.01 | 5.364.530.648 | 0.01 | 25.545.756.586 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 | persen | N/A | 100 | 125.000.000 | 100 | 128.125.000 | 100 | 131.328.125 | 100 | 134.611.328 | 100 | 137.976.611 | 100 | 657.041.064 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------------------------------|
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | persen | N/A | 82 | 150.000.000 | 84 | 153.750.000 | 86 | 157.593.750 | 88 | 161.533.594 | 90 | 165.571.934 | 90 | 788.449.278 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | persen | N/A | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.750.000 | 100 | 31.518.750 | 100 | 32.306.719 | 100 | 33.114.387 | 100 | 157.689.856 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|----------|-------------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | persen | N/A | 100 | 50.000.00 0 | 100 | 51.250.00 0 | 100 | 52.531.25 0 | 100 | 53.844.53 1 | 100 | 55.190.64 5 | 100 | 262.816.4 26 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup | persen | N/A | 100 | 30.000.00 0 | 100 | 30.750.00 0 | 100 | 31.518.75 0 | 100 | 32.306.71 9 | 100 | 33.114.38 7 | 100 | 157.689.8 56 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota | persen | N/A | 100 | 20.000.00 0 | 100 | 20.500.00 0 | 100 | 21.012.50 0 | 100 | 21.537.81 3 | 100 | 22.076.25 8 | 100 | 105.126.5 71 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani | persen | 74 | 73 | 8.169.827. 361 | 72 | 8.374.073. 045 | 71 | 8.583.424. 871 | 70 | 8.798.010. 493 | 72 | 9.017.960. 755 | 72 | 42.943.29 6.525 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| | Indeks Resiko Bencana | Predikat | Tinggi | Tinggi | 3.910.000. 000 | Tinggi | 4.007.750. 000 | Sedang | 4.107.943. 750 | Sedang | 4.210.642. 344 | Sedang | 4.315.908. 402 | Sedang | 20.552.24 4.496 | |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Persen | 50 | 55 | 3.910.000. 000 | 60 | 4.007.750. 000 | 65 | 4.107.943. 750 | 70 | 4.210.642. 344 | 80 | 4.315.908. 402 | 80 | 20.552.24 4.496 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Persen | 68,15 | 68,35 | 320.217.6 52.766 | 68,5 | 328.299.4 99.083 | 68,7 | 336.380.8 91.557 | 68,85 | 344.766.8 12.850 | 69,05 | 353.362.3 94.324 | 69,05 | 1.683.027. 250.580 | |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |

| | Outome) | | RPJMD | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Jawab |
|---|---|----------|----------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | Indeks Pendidikan | Skala | 0,26 | 0,3 | 129.081.4 60.311 | 0,36 | 132.384.9 01.817 | 0,42 | 135.568.4 29.361 | 0,5 | 138.934.0 45.099 | 0,55 | 142.383.8 01.223 | 0,55 | 678.352.6 37.811 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan | Persen | 48.30 | 50.72 | 105.038.4 35.535 | 53.25 | 107.664.3 96.423 | 55.91 | 110.356.0 06.334 | 58.71 | 113.114.9 06.492 | 61.64 | 115.942.7 79.155 | 61.64 | 552.116.5 23.939 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar | Paket | 2500 Paket | 3000 Paket | 82.500.00 0 | 3500 Paket | 84.562.50 0 | 4000 Paket | 86.676.56 3 | 4500 Paket | 88.843.47 7 | 5000 Paket | 91.064.56 3 | 20.000 Paket | 433.647.1 03 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rasio Guru Murid | Rasio | 1:20 Rasio | 1:20 Rasio | 16.819.26 4.088 | 1:20 Rasio | 17.339.74 5.690 | 1:20 Rasio | 17.670.73 9.332 | 1:20 Rasio | 18.112.50 7.816 | 1:20 Rasio | 18.565.32 0.511 | 1:20 Rasio | 88.507.57 7.437 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B | Persen | 63.39 | 63.89 | 150.000.0 00 | 64.39 | 153.750.0 00 | 64.89 | 157.593.7 50 | 65.39 | 161.533.5 94 | 65.89 | 165.571.9 34 | 65.89 | 788.449.2 78 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri | Persen | 12.32 | 12.82 Pers en | 857.999.9 98 | 13.32 Pers en | 879.449.9 98 | 13.82 Pers en | 901.436.2 48 | 14.32 Pers en | 923.972.1 54 | 14.82 Pers en | 947.071.4 58 | 14.82 Pers en | 4.509.929. 856 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi olahraga | Prestasi | 4 Prestasi | 5 Prestasi | 447.700.0 00 | 6 Prestasi | 458.892.5 00 | 7 Prestasi | 470.364.8 12 | 8 Prestasi | 482.123.9 33 | 8 Prestasi | 494.177.0 31 | 34 Prestasi | 2.353.258. 276 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 6 Orang | 7 Orang | 447.700.000 | 8 Orang | 458.892.500 | 9 Orang | 470.364.812 | 10 Orang | 482.123.933 | 10 Orang | 494.177.031 | 44 Orang | 2.353.258.276 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cakupan pembinaan atlet muda | Persen | 50.75 | 51.25 Persen | 447.700.000 | 51.75 Persen | 458.892.500 | 52.25 Persen | 470.364.812 | 52.75 Persen | 482.123.933 | 53.25 Persen | 494.177.031 | 53.25 Persen | 2.353.258.276 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cakupan pelatih yang bersertifikat | Persen | 38.87 | 39.37 Persen | 447.700.000 | 39.87 Persen | 458.892.500 | 40.37 Persen | 470.364.812 | 40.87 Persen | 482.123.933 | 41.37 Persen | 494.177.031 | 41.37 Persen | 2.353.258.276 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase sarpras olahraga yang layak | Persen | 0.05 | 0.06 Persen | 447.700.000 | 0.07 Persen | 458.892.500 | 0.07 Persen | 470.364.812 | 0.08 Persen | 482.123.933 | 0.08 Persen | 494.177.031 | 0.08 Persen | 2.353.258.276 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepramukaan | Orang | 0 Orang | 100 Orang | 943.799.998 | 100 Orang | 943.799.998 | 100 Orang | 943.799.998 | 100 Orang | 943.799.998 | 100 Orang | 943.799.998 | 100 Orang | 4.718.999.990 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk | persen | 1:18 Rasio | 1:18 Rasio | 712.740.173 | 1:17 Rasio | 730.558.677 | 1:16 Rasio | 748.822.644 | 1:15 Rasio | 767.543.210 | 1:14 Rasio | 786.731.790 | 1:14 Rasio | 3.746.396.494 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk | persen | 1:20.000 Rasio | 1:20.000 Rasio | 712.740.173 | 1:19.000 Rasio | 730.558.677 | 1:18.000 Rasio | 748.822.644 | 1:17.000 Rasio | 767.543.210 | 1:16.000 Rasio | 786.731.790 | 1:16.000 Rasio | 3.746.396.494 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | orang | 0.21 | 0.21 | 712.740.173 | 0.21 | 730.558.677 | 0.21 | 748.822.644 | 0.21 | 767.543.210 | 0.21 | 786.731.790 | 0.21 | 3.746.396.494 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|----------|-------------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat | prestasi | 10 | 10 | 712.740.1 73 | 11 | 730.558.6 77 | 12 | 748.822.6 44 | 13 | 767.543.2 10 | 14 | 786.731.7 90 | 14 | 3.746.396. 494 | DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan | orang | 100 | 100 | 100.000.0 00 | 100 | 102.500.0 00 | 100 | 105.062.5 00 | 100 | 107.689.0 63 | 100 | 110.381.2 89 | 100 Perse n | 525.632.8 52 | DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN |
| | Indeks Kesehatan | Skala | 0,508 | 0,522 | 181.292.0 86.187 | 0,556 | 185.824.3 88.341 | 0,578 | 190.469.9 98.049 | 0,612 | 195.231.7 47.998 | 0,632 | 200.112.5 41.702 | 0,632 | 952.930.7 62.277 | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | Persen | 8.3 | 100 | 133.618.0 65.166 | 100 | 136.958.6 41.796 | 100 | 140.382.7 32.840 | 100 | 143.892.4 26.161 | 100 | 147.489.8 61.815 | 100 | 702.341.7 27.778 | DINAS KESEHATAN |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 25.000.00 0 | DINAS KESEHATAN |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan | Persen | 100 | 100 | 36.932.42 4.796 | 100 | 37.855.73 5.416 | 100 | 38.802.12 8.801 | 100 | 39.772.18 2.021 | 100 | 40.766.48 6.572 | 100 | 194.128.9 57.606 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten | Jumlah | 25 | 30 | 1.942.974. 000 | 40 | 1.991.548. 350 | 60 | 2.041.337. 059 | 80 | 2.092.370. 485 | 100 | 2.144.679. 747 | 100 | 10.212.90 9.641 | DINAS KESEHATAN |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS | Persen | 80 | 85 | 230.565.5 00 | 100 | 236.329.6 38 | 100 | 242.237.8 78 | 100 | 248.293.8 25 | 100 | 254.501.1 71 | 100 | 1.211.928. 012 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar | persen | 70 | 75 | 1.024.930. 210 | 80 | 1.050.553. 465 | 85 | 1.076.817. 302 | 90 | 1.103.737. 734 | 95 | 1.131.331. 178 | 95 | 5.387.369. 889 | DINAS KESEHATAN |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Rumah Tangga Ber PHBS | Persen | 41.27 | 50 | 599.126.5 14 | 55 | 614.104.6 77 | 60 | 629.457.2 93 | 65 | 645.193.7 26 | 70 | 661.323.5 69 | 70 | 3.149.205. 779 | DINAS KESEHATAN |

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------|-------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Berwawasan Kependudukan | Persen | n/a | 53.00 | 245.000.000 | 55.00 | 251.125.000 | 57.00 | 257.403.125 | 59.00 | 263.838.203 | 61.00 | 270.434.158 | 61.00 | 1.287.800.486 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Unmeet need KB | Persen | 9.16 | 8.25 | 2.039.666.667 | 8.00 | 2.090.658.333 | 7.70 | 2.142.924.792 | 7.40 | 2.196.497.911 | 7.00 | 2.251.410.359 | 7.00 | 10.721.158.062 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persen | 63.39 | 65.00 | 2.039.666.667 | 67.00 | 2.090.658.333 | 68.00 | 2.142.924.792 | 69.00 | 2.196.497.911 | 70.00 | 2.251.410.359 | 70.00 | 10.721.158.062 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Rasio akseptor KB | Persen | 73.70 | 74.00 | 2.039.666.667 | 74.30 | 2.090.658.333 | 74.50 | 2.142.924.792 | 74.80 | 2.196.497.911 | 75.00 | 2.251.410.359 | 75.00 | 10.721.158.062 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri | Persen | 82.74 | 82.90 | 115.000.000 | 83.00 | 117.875.000 | 83.10 | 120.821.875 | 83.20 | 123.842.422 | 83.30 | 126.938.483 | 83.30 | 604.477.780 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| | | | Kondisi | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada | | Perangkat |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|-----------|
|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|-----------|

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kinerja Awal RPJMD | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|-------------------------|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|--|
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 80.92 | 81.30 | 115.000.000 | 81.50 | 117.875.000 | 81.60 | 120.821.875 | 81.80 | 123.842.422 | 82.00 | 126.938.483 | 82.00 | 604.477.780 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 71.94 | 72.30 | 115.000.000 | 72.50 | 117.875.000 | 72.60 | 120.821.875 | 72.80 | 123.842.422 | 73.00 | 126.938.483 | 73.00 | 604.477.780 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 77.23 | 78.00 | 115.000.000 | 78.30 | 117.875.000 | 78.50 | 120.821.875 | 78.80 | 123.842.422 | 79.00 | 126.938.483 | 79.00 | 604.477.780 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa | Persen | 90.0 | 90.9 | 115.000.000 | 90.9 | 117.875.000 | 90.9 | 120.821.875 | 90.9 | 123.842.422 | 100 | 126.938.483 | 100 | 604.477.780 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli) | Ribu Rupiah/Orang/Tahun | 9.500 | 12.000 | 6.746.152.726 | 24.000 | 6.914.806.544 | 32.500 | 7.087.676.707 | 44.000 | 7.264.868.625 | 52.000 | 7.446.490.344 | 52.000 | 35.459.994.946 | |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP | persen | 14.37 | 15.19 | 45.000.000 | 15.55 | 46.125.000 | 15.90 | 47.278.125 | 16.25 | 48.460.078 | 16.61 | 49.671.580 | 16.61 | 236.534.783 | DINAS PERDAGANGAN |

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Toko (IKK Outcome) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | persen | 71.43 | 73.32 | 6.000.000.000 | 75.09 | 6.150.000.000 | 76.68 | 6.303.750.000 | 78.63 | 6.461.343.750 | 80.41 | 6.622.877.344 | 80.41 | 31.537.971.094 | DINAS PERDAGANGAN |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya | persen | 2 | 3 | 50.000.000 | 5 | 51.250.000 | 6 | 52.531.250 | 7 | 53.844.531 | 8 | 55.190.645 | 8 | 262.816.426 | DINAS PERDAGANGAN |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Peningkatan Volume Ekspor | Persen | 2 | 3 | 75.000.000 | 5 | 76.875.000 | 7 | 78.796.875 | 8 | 80.766.797 | 9 | 82.785.967 | 9 | 394.224.639 | DINAS PERDAGANGAN |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (IKK Outcome) | Persen | 76.78 | 79.08 | 59.976.000 | 83.69 | 61.475.400 | 85.99 | 63.012.285 | 88.29 | 64.587.592 | 88.29 | 66.202.282 | 88.29 | 315.253.559 | DINAS PERDAGANGAN |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | persen | N/A | 1.50 | 150.000.000 | 2 | 153.750.000 | 2.5 | 157.593.750 | 3.00 | 161.533.594 | 3.50 | 165.571.934 | 3.50 | 788.449.278 | DINAS PERDAGANGAN |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat | persen | 135 | 100 | 75.180.842 | 100 | 77.060.363 | 100 | 78.986.872 | 100 | 80.961.544 | 100 | 82.985.583 | 100 | 395.175.204 | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--------|-------------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan | persen | 3.4 | 3.6 | 75.180.84 2 | 3.8 | 77.060.36 3 | 4 | 78.986.87 2 | 4.2 | 80.961.54 4 | 4.4 | 82.985.58 3 | 4.4 | 395.175.2 04 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional | persen | 100 | 100 | 75.180.84 2 | 100 | 77.060.36 3 | 100 | 78.986.87 2 | 100 | 80.961.54 4 | 100 | 82.985.58 3 | 100 | 395.175.2 04 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan | persen | 100 | 100 | 90.000.00 0 | 100 | 92.250.00 0 | 100 | 94.556.25 0 | 100 | 96.920.15 6 | 100 | 99.343.16 0 | 100 | 473.069.5 66 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan | persen | 85 | 85 | 50.634.20 0 | 85 | 51.900.05 5 | 85 | 53.197.55 6 | 85 | 54.527.49 5 | 85 | 55.890.68 3 | 85 | 266.149.9 89 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | Indeks Pemberdayaan Gender | Persen | 58,96 | 59,12 | 1.715.000. 000 | 59,58 | 1.757.875. 000 | 59,87 | 1.801.821. 875 | 60,12 | 1.846.861. 423 | 60,55 | 1.893.039. 108 | 60,55 | 9.014.597. 406 | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Persen | 20 | 23 | 280.000.0 00 | 25 | 287.000.0 00 | 27 | 294.175.0 00 | 30 | 301.523.3 75 | 35 | 309.067.6 09 | 35 | 1.471.765. 984 | DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani | Persen | 100 | 100 | 275.000.0 00 | 100 | 281.875.0 00 | 100 | 288.921.8 75 | 100 | 296.144.9 22 | 100 | 303.548.5 45 | 100 | 1.445.490. 342 | DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB | Persen | n/a | 29.03 | 250.000.0 00 | 35.16 | 256.250.0 00 | 41.29 | 262.656.2 50 | 50.65 | 269.222.6 56 | 60.00 | 275.953.2 23 | 60.00 | 1.314.082. 129 | DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------|-------------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase ketersediaan data gender dan anak | Persen | n/a | 100 | 150.000.0 00 | 100 | 153.750.0 00 | 100 | 157.593.7 50 | 100 | 161.533.5 94 | 100 | 165.571.9 34 | 100 | 788.449.2 78 | DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Dekela (desa/kelurahan,Keca matan layak anak) | Persen | 22.22 | 29.63 | 500.000.0 00 | 33.33 | 512.500.0 00 | 40.74 | 525.312.5 00 | 48.15 | 538.445.3 13 | 55.56 | 551.906.4 45 | 55.56 | 2.628.164. 258 | DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten | Persen | 100 | 100 | 260.000.0 00 | 100 | 266.500.0 00 | 100 | 273.162.5 00 | 100 | 279.991.5 63 | 100 | 286.991.3 52 | 100 | 1.366.645. 415 | DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Indeks Kesejahteraan Sosial | Persen | 50 | 55 | 1.382.953. 542 | 60 | 1.417.527. 381 | 65 | 1.452.965. 565 | 70 | 1.489.289. 705 | 75 | 1.526.521. 947 | 75 | 7.269.258. 140 | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif | Persen | 50 | 50 | 529.394.8 00 | 58 | 542.629.6 70 | 67 | 556.195.4 11 | 75 | 570.100.2 97 | 75 | 584.352.8 04 | 75 | 2.782.672. 982 | DINAS SOSIAL |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persen | 100 | 100 | 12.425.16 0 | 100 | 12.735.78 9 | 100 | 13.054.18 4 | 100 | 13.380.53 8 | 100 | 13.715.05 2 | 100 | 65.310.72 3 | DINAS SOSIAL |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | Persen | 100 | 100 | 300.000.0 00 | 100 | 307.500.0 00 | 100 | 315.187.5 00 | 100 | 323.067.1 88 | 100 | 331.143.8 67 | 100 | 1.576.898. 555 | DINAS SOSIAL |

| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial | Persen | 62,67 | 58,46 | 400.268.902 | 56,69 | 410.275.625 | 55,12 | 420.532.515 | 53,73 | 431.045.828 | 52,49 | 441.821.974 | 52,49 | 2.103.944.844 | DINAS SOSIAL |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM) | Persen | N/A | 100 | 132.946.880 | 100 | 136.270.552 | 100 | 139.677.316 | 100 | 143.169.249 | 100 | 146.748.480 | 100 | 698.812.477 | DINAS SOSIAL |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial | Persen | 100 | 100 | 7.917.800 | 100 | 8.115.745 | 100 | 8.318.639 | 100 | 8.526.605 | 100 | 8.739.770 | 100 | 41.618.559 | DINAS SOSIAL |
| Mewujudkan daerah yang beradab dengan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mengedepankan pendekatan Agama, Budaya dan kearifan lokal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara | Indeks ketentraman dan ketertiban | Persen | N/A | 100 | 7.144.258.876 | 100 | 7.322.865.349 | 100 | 7.505.936.982 | 100 | 7.693.585.406 | 100 | 7.885.925.041 | 100 | 37.552.571.654 | |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Indeks kriminilitas | Persen | N/A | 100 | 7.144.258.876 | 100 | 7.322.865.349 | 100 | 7.505.936.982 | 100 | 7.693.585.406 | 100 | 7.885.925.041 | 100 | 37.552.571.654 | |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani | Persen | N/A | 100 | 29.967.300 | 100 | 30.716.483 | 100 | 31.484.395 | 100 | 32.271.504 | 100 | 33.078.292 | 100 | 157.517.974 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu | Persen | 100 | 100 | 720.545.921 | 100 | 738.559.569 | 100 | 757.023.558 | 100 | 775.949.147 | 100 | 795.347.876 | 100 | 3.787.426.071 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--|---------------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Ormas yang terbina | Persen | 100 | 100 | 431.090.0 00 | 100 | 441.867.2 50 | 100 | 452.913.9 31 | 100 | 464.236.7 80 | 100 | 475.842.6 99 | 100 | 2.265.950. 660 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan | Persen | 100 | 100 | 29.487.70 0 | 100 | 30.224.89 3 | 100 | 30.980.51 5 | 100 | 31.755.02 8 | 100 | 32.548.90 3 | 100 | 154.997.0 39 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 55.000.00 0 | 100 | 56.375.00 0 | 100 | 57.784.37 5 | 100 | 59.228.98 4 | 100 | 60.709.70 9 | 100 | 289.098.0 68 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 5.171.967. 955 | 100 | 5.301.267. 154 | 100 | 5.433.798. 833 | 100 | 5.569.643. 804 | 100 | 5.708.884. 899 | 100 | 27.185.56 2.645 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran | Persen | 100 | 100 | 706.200.0 00 | 100 | 723.855.0 00 | 100 | 741.951.3 75 | 100 | 760.500.1 59 | 100 | 779.512.6 63 | 100 | 3.712.019. 197 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| Mewujudkan daya saing ekonomi daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| berbasis inovasi dan potensi Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi | Indeks Gini | Persen | 0,36 | 0,32 | 39.661.86 6.962 | 0,28 | 40.727.00 8.624 | 0,25 | 41.870.60 0.726 | 0,2 | 42.941.66 1.826 | 0,19 | 44.038.79 2.212 | 0,19 | 209.239.9 30.350 | |
| Meningkatnya pertumbuhan sektor sektor unggulan daerah | Pertumbuhan ekonomi | Persen | -2,08 | 5.0- 5.5% | 38.854.29 3.962 | 5.5- 5.6% | 39.899.24 6.299 | 5.6- 5.7% | 41.022.14 4.343 | 5.7- 5.8% | 42.071.99 4.032 | 5.8- 6.0% | 43.147.38 2.725 | 5.8- 6.0% | 204.995.0 61.361 | |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|--------|----------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|--|-------------------------|---|
| PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat | persen | 100 | 100 | 15.000.00 ₀ | 100 | 15.375.00 ₀ | 100 | 15.759.37 ₅ | 100 | 16.153.35 ₉ | 100 | 16.557.19 ₃ | 100 | 78.844.92 ₇ | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIA N |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa | persen | 17 | 19 | 30.000.00 ₀ | 21 | 30.750.00 ₀ | 23 | 31.518.75 ₀ | 25 | 32.306.71 ₉ | 30 | 33.114.38 ₇ | 30 | 157.689.8 ₅₆ | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIA N |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase KSP/USP yang sehat | Persen | 9.5 | 10 | 25.000.00 ₀ | 11 | 25.625.00 ₀ | 12 | 26.265.62 ₅ | 15 | 26.922.26 ₆ | 20 | 27.595.32 ₂ | 20 | 131.408.2 ₁₃ | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIA N |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian | Persen | 7 | 9 | 50.000.00 ₀ | 10 | 51.250.00 ₀ | 12 | 52.531.25 ₀ | 14 | 53.844.53 ₁ | 15 | 55.190.64 ₅ | 15 | 262.816.4 ₂₆ | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIA N |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab. | Persen | 5 | 5 | 30.000.00 ₀ | 7 | 30.750.00 ₀ | 8 | 31.518.75 ₀ | 10 | 32.306.71 ₉ | 15 | 33.114.38 ₇ | 15 | 157.689.8 ₅₆ | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIA N |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan | Persen | 5 | 5 | 85.000.000 | 5 | 87.125.000 | 5 | 89.303.125 | 5 | 91.535.703 | 5 | 93.824.096 | 5 | 446.787.924 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|---|
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 25 | 25 | 1.401.516.944 | 25.5 Persen | 1.436.554.868 | 26.2 Persen | 1.472.468.739 | 26.8 Persen | 1.509.280.458 | 27.5 Persen | 1.547.012.469 | 27.5 Persen | 7.366.833.478 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome) | Persen | 5 | 10 | 593.936.000 | 10 | 608.784.400 | 15 | 624.004.010 | 20 | 639.604.110 | 25 | 655.594.213 | 25 | 3.121.922.733 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menegah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.500.000 | 100 | 21.012.500 | 100 | 21.537.813 | 100 | 22.076.258 | 100 | 105.126.571 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Tingkat Ketersediaan informasi industri | Persen | 100 | 100 | 66.434.000 | 100 | 68.094.850 | 100 | 69.797.221 | 100 | 71.542.152 | 100 | 73.330.706 | 100 | 349.198.929 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap | Persen | 4.42 | 5.88 | 4.985.671.701 | 11.76 | 5.110.313.493 | 17.65 | 5.238.071.331 | 23.53 | 5.369.023.114 | 29.41 | 5.503.248.692 | 29.41 | 26.206.328.331 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 3.33 | 6.45 | 99.880.00 0 | 12.9 | 102.377.0 00 | 19.35 | 104.936.4 25 | 25.81 | 107.559.8 36 | 32.26 | 110.248.8 32 | 32.26 | 525.002.0 93 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|---|---|--------|----------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|--------------------|--|
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase kenaikan produksi budidaya | Persen | 1.87 | 1.96 | 3.148.841. 741 | 3.92 | 3.227.562. 785 | 5.88 | 3.308.251. 854 | 7.84 | 3.390.958. 151 | 9.8 | 3.475.732. 104 | 9.8 | 16.551.34 6.635 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan | Persen | 1.22 | 1.22 | 773.946.5 80 | 2.24 | 793.295.2 45 | 3.36 | 813.127.6 26 | 4.48 | 833.455.8 16 | 5.56 | 854.292.2 12 | 5.56 | 4.068.117. 479 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah | Persen | 2.50 | 2.44 | 50.000.00 0 | 4.88 | 51.250.00 0 | 7.32 | 52.531.25 0 | 9.76 | 53.844.53 1 | 12.20 | 55.190.64 5 | 12.20 | 262.816.4 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan | Persen | 90 | 90 | 242.444.8 09 | 95 | 223.037.5 92 | 95 | 270.419.1 61 | 95 | 285.278.3 33 | 95 | 300.273.2 37 | 95 | 1.321.453. 132 | DINAS PERKEBUNAN |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan | Persen | 100 | 100 | 3.715.415. 180 | 100 | 3.808.300. 560 | 100 | 3.903.508. 073 | 100 | 4.001.095. 775 | 100 | 4.101.123. 170 | 100 | 19.529.44 2.758 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan | Persen | N/A | 90 | 2.802.742. 791 | 90 | 2.872.811. 361 | 90 | 2.944.631. 645 | 95 | 3.018.247. 436 | 100 | 3.093.703. 622 | 100 | 14.732.13 6.855 | DINAS PERKEBUNAN |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan | Persen | 100 | 100 | 6.539.733. 179 | 100 | 6.703.226. 508 | 100 | 6.870.807. 171 | 100 | 7.042.577. 350 | 100 | 7.218.641. 784 | 100 | 34.374.98 5.992 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | Persen | 100 | 100 | 124.883.8 55 | 100 | 128.005.9 51 | 100 | 131.206.1 00 | 100 | 134.486.2 53 | 100 | 137.848.4 09 | 100 | 656.430.5 68 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |

| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan | Persen | 70 | 75 | 16.795.60 ₈ | 75 | 17.215.49 ₈ | 80 | 17.645.88 ₆ | 80 | 18.087.03 ₃ | 85 | 18.539.20 ₉ | 85 | 88.283.23 ₄ | DINAS PERKEBUNAN |
|---|--|--------|----------------------------|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persen | 100 | 100 | 39.189.75 ₂ | 100 | 40.169.49 ₆ | 100 | 41.173.73 ₃ | 100 | 42.203.07 ₇ | 100 | 43.258.15 ₃ | 100 | 205.994.2 ₁₁ | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase perizinan usaha pertanian | Persen | 75 | 75 | 242.444.8 ₀₉ | 75 | 223.037.5 ₉₂ | 80 | 270.419.1 ₆₁ | 80 | 285.278.3 ₃₃ | 85 | 300.273.2 ₃₇ | 85 | 1.321.453.132 | DINAS PERKEBUNAN |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Perizinan Usaha Pertanian | Persen | N/A | 100 | 101.636.8 ₀₀ | 100 | 104.177.7 ₂₀ | 100 | 106.782.1 ₆₃ | 100 | 109.451.7 ₁₇ | 100 | 112.188.0 ₁₀ | 100 | 534.236.4 ₁₀ | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina | Persen | 85 | 85 | 242.444.8 ₀₉ | 90 | 223.037.5 ₉₁ | 90 | 270.419.1 ₆₀ | 90 | 285.278.3 ₃₂ | 95 | 300.273.2 ₃₈ | 95 | 1.321.453.130 | DINAS PERKEBUNAN |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina | Persen | 100 | 100 | 796.458.4 ₀₄ | 100 | 816.369.8 ₆₄ | 100 | 836.779.1 ₁₁ | 100 | 857.698.5 ₈₈ | 100 | 879.141.0 ₅₃ | 100 | 4.186.447.020 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | 2.2 | 2.3 | 9.500.000.000 | 2.4 | 9.737.500.000 | 2.5 | 9.980.937.500 | 2.5 | 10.230.460.938 | 2.6 | 10.486.222.461 | 2.6 | 49.935.120.899 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Persen | N/A | 20 | 690.000.000 | 25 | 707.250.000 | 40 | 724.931.250 | 45 | 743.054.531 | 50 | 761.630.895 | 50 | 3.626.866.676 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi | Kelompok | 1 | 5 | 150.000.000 | 8 | 153.750.000 | 11 | 157.593.750 | 14 | 161.533.594 | 16 | 165.571.934 | 16 | 788.449.278 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
|--|--|---------------|----------------------------|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|---------------|--|
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar | Persen | N/A | N/A | 0 | 15 | 150.000.000 | 20 | 153.750.000 | 25 | 157.593.750 | 30 | 161.533.594 | 30 | 622.877.344 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Presentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan | Persen | 100 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.025.000.000 | 100 | 1.050.625.000 | 100 | 1.076.890.625 | 100 | 1.103.812.891 | 100 | 5.256.328.516 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL | Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi | Kelompok | 8 | 8 | 250.000.000 | 6 | 256.250.000 | 6 | 262.656.250 | 7 | 269.222.656 | 7 | 275.953.223 | 7 | 1.314.082.129 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya | Persen | 10 | 20 | 912.877.000 | 20 | 935.698.925 | 25 | 959.091.398 | 30 | 983.068.683 | 35 | 1.007.645.400 | 35 | 4.798.381.406 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase pengunjung museum | Persen | 2.3 | 3.3 | 112.000.000 | 4.3 | 114.800.000 | 5.3 | 117.670.000 | 6.3 | 120.611.750 | 7.3 | 123.627.044 | 7.3 | 588.708.794 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| Meningkatnya Investasi Daerah | Pertumbuhan Investasi | Persen | 15 | 15 | 807.573.000 | 15 | 827.762.325 | 15 | 848.456.383 | 15 | 869.667.794 | 15 | 891.409.487 | 15 | 4.244.868.989 | |
| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Nilai Investasi | Miliar Rupiah | 310 iah | 325 Miliar /Rupiah | 300.000.000 | 340 Miliar /Rupiah | 307.500.000 | 355 Miliar /Rupiah | 315.187.500 | 360 Miliar /Rupiah | 323.067.188 | 375 Miliar /Rupiah | 331.143.867 | 375 Miliar /Rupiah | 1.576.898.555 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---|
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Peningkatan Investor | Investor | 35 Investor | 39 Investor | 70.000.00 0 | 44 Investor | 71.750.00 0 | 51 Investor | 73.543.75 0 | 59 Investor | 75.382.34 4 | 65 Investor | 77.266.90 2 | 65 Investor | 367.942.9 96 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Persen | 100 | 100 | 90.000.00 0 | 100 | 92.250.00 0 | 100 | 94.556.25 0 | 100 | 96.920.15 6 | 100 | 99.343.16 0 | 100 | 473.069.5 66 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal | Persen | 50 | 50 | 322.573.0 00 | 50 | 330.637.3 25 | 50 | 338.903.2 58 | 50 | 347.375.8 40 | 50 | 356.060.2 36 | 50 | 1.695.549. 659 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan | Persen | 100 | 100 | 25.000.00 0 | 100 | 25.625.00 0 | 100 | 26.265.62 5 | 100 | 26.922.26 6 | 100 | 27.595.32 2 | 100 | 131.408.2 13 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Mengentaskan Kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 7,4 | 6 | 2.790.240.000 | 5,5 | 2.859.996.000 | 5 | 2.931.495.901 | 4,5 | 3.004.783.299 | 4 | 3.079.902.880 | 4 | 14.666.418.080 | |
| Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja | Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 2,89 | 2,75 | 368.240.000 | 2,49 | 377.446.000 | 2,27 | 386.882.151 | 2,05 | 396.554.204 | 2 | 406.468.059 | 2 | 1.935.590.414 | |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | persen | N/A | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 27.000.000 | 22 | 27.000.000 | 25 | 27.000.000 | 25 | 131.000.000 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja | persen | 62 | 68 | 106.600.000 | 70 | 109.265.000 | 75 | 111.996.625 | 80 | 114.796.541 | 85 | 117.666.454 | 85 | 560.324.620 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | persen | 0.93 | 21 | 190.140.000 | 23 | 194.893.500 | 25 | 199.765.838 | 27 | 204.759.983 | 29 | 209.878.983 | 29 | 999.438.304 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) | persen | 44 | 46 | 46.500.000 | 46 | 48.287.500 | 47 | 48.119.688 | 48 | 49.997.680 | 49 | 51.922.622 | 49 | 244.827.490 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| Meningkatnya Kemandirian Desa | Indeks Desa Membangun | Skala | 0,611 (Berke mbang) | 0,624 (Berke mbang) | 2.422.000.000 | 0,645 (Berke mbang) | 2.482.550.000 | 0,687 (Berke mbang) | 2.544.613.750 | 0,7 (Berke mbang) | 2.608.229.095 | 0,707 (Maju) | 2.673.434.821 | 0,707 (Maju) | 12.730.827.666 | |
| PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas | persen | N/A | 50 | 500.000.000 | 60 | 512.500.000 | 70 | 525.312.500 | 80 | 538.445.313 | 90 | 551.906.445 | 90 | 2.628.164.258 | DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA |



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
SEKRETARIAT DAERAH**

**BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN MAMUJU**

| | |
|-------------------|--|
| Nomor SOP | 009/310/1/2025 |
| Tanggal Pembuatan | 30 Januari 2025 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan Oleh | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU DR.H. SUAB, S.Sos, M.M Pembina Utama Madya NIP. 19661007 198703 1 011 |
| Nama SOP | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten |

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksana : |
| - Peraturan - Peraturan | 1 S-1 Sederajat 2 Mampu mengoperasikan program komputer (MS Word, Excel dan Internet) 3 Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4 Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 6 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim |
| Keterkaitan : | Peralatan / Perlengkapan : |
| - SOP Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju | 1 Jaringan Internet 2 Komputer 3 Printer 4 ATK 5 Flask Disc |
| Peringatan : | Pencatatan dan Pendataan : |
| - Penyusuna - Dibuat time schedule terkait proses penyusunan LKjIP | Data - data dari SKPD diolah dan hasilnya dicetak untuk dijadikan Dokumen Laporan Kinerja. |

REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU

| SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | Tahun 2024 | | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | |
| Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | B | B | 100 |
| | Indeks Pengelolaan keuangan Daerah | Peringkat / Nilai | Baik/A | Perlu Perbaikan/B | 75 |
| | Nilai LPPD | Skor | Sangat Tinggi | Sedang | 50 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor | 90 | 76,74 | 85,26 |
| Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah | Indeks Pembangunan Infrastruktur | Persen | 70 | 78 | 111,43 |
| | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Persen | 70 | 82 | 117,14 |
| Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 80 | 74,66 | 93,32 |
| | Indeks Resiko Bencana | Predikat | Sedang | Sedang | 100 |
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | Indeks Pembangunan Manusia | Persen | 68,70 | 71,86 | 104,59 |
| | Indeks Pendidikan | Skala | 0,42 | 0,64 | 152,38 |
| | Indeks Kesehatan | Skala | 0,578 | 0,802 | 138.75 |
| | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) | Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun | 32.500 | 10.440 | 32,12 |
| | Indeks Pemberdayaan Gender | Persen | 59,87 | 60,96 | 101,82 |
| | Indeks Kesejahteraan Sosial | Persen | 65 | 77 | 122 |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Indeks ketentraman dan ketertiban | Persen | 100 | 99,65 | 99,65 |
| | Indeks Kriminilitas | Persen | 100 | 99,65 | 99,65 |
| Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah | Indeks Gini | Persen | 0,25 | 0,425 | 58,82 |
| | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 5.6-5.7% | 6,47 | 113,50 |
| Meningkatnya investasi daerah | Pertumbuhan Investasi | Persen | 15 | 45,04 | 300,26 |
| Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 5 | 7,15 | 69,93 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 2,27 | 2,77 | 81,95 |
| Meningkatnya kemandirian desa | Indeks Desa Membangun | Skala | 0,698 (Berkembang) | 0,667 (Berkembang) | 96 |

DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

1. UHC Award dari Kementerian Kesehatan Atas Komitmen Dalam Memberikan Jaminan Kesehatan Gratis Kepada Masyarakat
2. Penghargaan sebagai daerah Peduli Ham dari Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2024
3. Penghargaan dari BPKP terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Kategori Maturisasi Level 3.
4. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK RI, Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Berturut-turut dalam dua tahun terakhir
5. Penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju, sebagai Pemohon Lelang Barang Non Eksekusi Tahun 2024
6. Penghargaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2024 Dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Penghargaan Kharisma Event Nusantara Atas Kegiatan Manakarra Fair 2024 dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU



(0426) 2324500



www.mamujukab.go.id



Jl. Soekarno Hatta No. 1